

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017
SUATU TINJAUAN MODEL MASYARAKAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ASIH MAHYUNI

NIM 140801046

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SURAT KEASLIAN

Yang ini menyatakan:

Nama : Asih Mahyuni
Nim : 140801046
Jenjang : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 06 September 2018

Yang menyatakan,



Asih Mahyuni
Nim: 140801046

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017
SUATU TINJAUAN MODEL MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

ASIH MAHYUNI

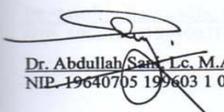
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

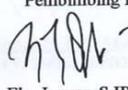
Nim: 140801046

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Abdullah Sam Lc. M.A
NIP. 19640705 199603 1 001

Pembimbing II


Eka Januar S.I.P. M. Soc. Sc
NIP. 1984010120150310

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan oleh:
ASIH MAHYUNI
140801046

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 15 Agustus 2018 M
29 Dzulkaidah 1439 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Eka Januar, S.Pi, Lc, MA
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,


Eka Januar, M. Soc. Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji I,


Zainuddin, M. Si
NIP. 196202319940021001

Penguji II,


Aklima, S. Fil., MA
NIDN. 2006108802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY


Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307232000032002



Abstrak

Nama : Asih Mahyuni
Nim : 140801046
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Model Masyarakat
Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani, Lc., MA
Pembimbing II : Eka Januar, M. Soc. Sc

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah, yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang patut untuk ditaati. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan suatu Daerah terdapat pembagian masyarakat, yaitu masyarakat maju dan masyarakat sederhana, masyarakat maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapai sekalipun berbeda golongan, dan masyarakat sederhana adalah masyarakat lebih baik yang hanya menginginkan persatuan perbedaan mereka. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa penyebab terbentuknya model masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil Tahun 2017 dan berapa banyak model masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Singkil Tahun 2017. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berarti menggambarkan fenomena yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini terdapat beberapa penyebab terbentuknya model masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah diantaranya ialah kurangnya penegakan hukum, kurangnya pengawas oleh penegak hukum, masyarakat Aceh Singkil masih terlalu awam, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi sampai sekarang yang dapat diamati adalah bahwa, proses atau permainan politik uang itu sampai sekarang belum bisa untuk dihilangkan dan sudah menjadi sebuah kebudayaan bagi Negara Indonesia.

Kata Kunci *Pilkada dan Model-Model Masyarakat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Skripsi hasil penelitian berjudul *“Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Model Masyarakat”*. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Ungkapan terimakasih tulus ikhlas penulis sampaikan kepada semua pihak dan orang-orang istimewa diluar dari pada penulis, yang tentu saja sudah sangat banyak membantu, memotivasi, memberi bimbingan dan berbagai bentuk upaya melancarkan perjuangan penulis dalam usaha menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa upaya kerjasama maka tidak akan ada karya ini. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum. Selaku Dekan Fisip Uin Ar-raniry.
3. Dr. Abdullah Sani, Lc. MA. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Politik, sekaligus sebagai pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

4. Eka Januar M. Soc. SC. Selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan.
5. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta atas segala jasa-jasanya, motivasi, kesabaran, do'a, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus dan ikhlas kepada penulis.
6. Saudara-saudara tercinta Ogek, Oyok, Uweng, Iyek, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moral maupun material demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman saya Lidya, Ainol Marziah, Nindi Yusifa, Safrida, Nida Hamima, rekan-rekan Ilmu Politik Angkatan 2014 yang seperguruan dan sekampus, sahabat-sahabat dan berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan kepeduliannya dalam perjalanan penulisan karya skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya Aamiin.

Banda Aceh, 06 September 2018.

Penulis,

Asih Mahyuni

Nim. 140801046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Deskripsi Teoritis	6
2.2 Masyarakat di Klasifikasikan atas Partisipasi Politik.....	6
2.3 Budaya Politik	7
2.4 Model-Model Masyarakat	8
2.5 Pembagian Masyarakat	13
2.6 Ciri-Ciri Suatu Kelompok disebut Masyarakat	14
2.7 Ciri-Ciri Masyarakat.....	14
2.8 Fungsi Sosial Masyarakat.....	15
2.9 Proses Terbentuknya Masyarakat.....	16
2.10 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	17
2.11 Sistem pemilihan Umum	19
2.12 Azas-Azas Pemilihan Umum	20
2.13 Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)	21
2.14 Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah .	22
2.15 Tahapan Pilkada dari segi Politik Elektoral Proses.....	23
2.16 Bentuk Kecenderungan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.3 Jenis Peneliian	28

3.4 Sumber dan Jenis Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil.....	30
4.1.2 Sejarah Kabupaten Aceh Singkil.....	30
4.2 Penyebab Terbentuknya Model Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil.....	34
4.2.1 Kurangnya Penegakan Hukum	34
4.2.2 Kurangnya Pengawas Oleh Badan Penegak Hukum (PANWASLU)	37
4.2.3 Masyarakat Aceh Singkil Masih Terlalu Awam	40
4.3 Model Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil	48
4.3.1 Masyarakat Miskin	48
4.3.2 Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik.....	52
4.3.3 Membudaya (penyakit masyarakat yang sudah terbiasa)	57
4.3.4 Persamaan Suku	60
4.3.5 Pemikiran Yang Lebih Maju	63
4.3.6 Masyarakat Apatis	65
BAB V Kesimpulan Dan Saran	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73
Daftar Pustaka	69
Lampiran.....	71
Daftar Riwayat Hidup.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Masyarakat maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya dengan kebersamaan meskipun berbeda golongan. Dan masyarakat sederhana adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang primitif, yang hanya membedakan antara laki-laki dan perempuan saja.

Teori Karl Marx

Masyarakat kelas bawah (masyarakat kurang mampu) adalah suatu susunan masyarakat yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan kehidupan sosialnya, karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Sehingga bermunculan kelas-kelas sosial antar masyarakat, diantaranya adanya masyarakat miskin, menengah, dan kaya, sehingga terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat tersebut.¹

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat. Masyarakat Sipil (Civil Society), banyak diterjemahkan dengan berbagai macam makna. Pada hakekatnya, versi terjemahan apapun yang dipakai, ternyata rujukan berpijaknya bertemu pada pemahaman konseptual yang sama. Pada dasarnya istilah manapun yang dipakai tidak menjadi soal sepanjang kita memiliki perspektif, sudut pandang dan pemahaman konseptual yang sama menurut makna istilah yang digunakan.²

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dalam Pemilihan Kepala

¹ Bottomoro Tom, 1992, *Sosiologi Politik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

² Jurnal Hasil Riset, 2016, *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*, (30-07-2018).

Daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang ternyata jauh lebih mahal dibandingkan dengan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD.³

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) masyarakat sangat berperan penting dalam suatu pemilihan kepala daerah, apalagi Indonesia menganut sistem Demokrasi, yang dimana makna demokrasi yang kita ketahui ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (pemilu) adalah suatu kegiatan penting dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat (demokrasi). Yang di mana kita memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Pemilihan umum, ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun dan sudah kawin. Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia.

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dicerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum

³ Jurnal Nopyandri, 2006, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945*, (30-07-20).

tidak merupakan salah satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan.⁴

Diantaranya ada empat pasangan kandidat yang maju dalam PILKADA (pemilihan kepala daerah) Aceh Singkil pada 15 Februari 2017 yang lalu, yaitu:

No	Nama	Partai Pengusung	Jumlah Suara
1	H. Safriadi SH/ Sariman	Golkar, Nasdem, PKPI, PPP	23.352
2	Yakarim Munir/Roesman Hasmy	PA, Gerindra, PKS	8.518
3	Dulmusrid/H. Sazali	PAN, PKB, PDI Perjuangan	26.000
4	Putra Ariyanto/Hendri Syahputra	Hanura, PBB, PDA	2.323

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul **“PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 SUATU TINJAUAN TERHADAP MODEL MASYARAKAT”**. Dari judul tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terbentuknya model masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil Tahun 2017?
2. Apa saja model masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa model masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna bagi kepentingan praktis dan teoritis

⁴ Dulmusrid, *Calon Kandidat Aceh Singkil*, (Aceh Singkil: 2017)

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan terutama bagi penulis sendiri dan kepada seluruh masyarakat,
- b. Dapat menjadi masukan referensi bagi para mahasiswa yang terkait dalam bidang ilmu politik maupun bidang lainnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait kecenderungan apa saja yang membuat masyarakat memilih dalam pilkada Aceh Singkil tahun 2017, dan penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran khususnya dibidang ilmu politik.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dan mahasiswa lainnya khususnya dibidang ilmu politik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teoritis

Deskripsi teoritis merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, dan berisi tentang penjelasan variabel-variabel yang diteliti melalui uraian yang mendalam yang lengkap dari berbagai referensi, dan dapat dijelaskan secara baik.

Teori Karl Marx

Masyarakat kelas bawah (masyarakat kurang mampu) adalah suatu susunan masyarakat yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan kehidupan sosialnya, karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Sehingga bermunculan kelas-kelas sosial antar masyarakat, diantaranya adanya masyarakat miskin, menengah, dan kaya, sehingga terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat tersebut.¹

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, persaan, sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.²

2.2 Masyarakat di Klasifikasikan atas Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good goverment*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat yang dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isu keputusan politik.³

2.3 Budaya Politik

Budaya atau kebudayaan sangat luas lingkungnya di mana mencakup pola pikir, sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan. Sementara itu, politik bertalian dengan kebijakan

¹Tom Bottomore, 1992, *Sosiologi Politik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 1.

²Jurnal Hasil Riset, 2016, *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*, (30-07-2018).

³ Jurnal Astim Riyanto, 2006, *Budaya Politik Indonesia*, (20-08-2018).

dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik dapat dimaknai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Dalam sikap politik yang dilandasi kearifan dapat tumbuh kebajikan politik (*political virtue*).

Adapun tipe budaya politik diantaranya:

1. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi *out-put* nya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atas aspek *input* serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang sangat nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataannya baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem.

2. Budaya Politik Parokial

Adalah budaya politik terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi dangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Dalam masyarakat yang bersifat yang parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi tidak terdapat peranan politik yang khas dan berdiri sendiri.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) serta dapat pula merealisasikan dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik sistem sebagai totalitas, *input* dan *output* maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena tercakupnya aliran *input* dan aliran *output* itu sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu betapapun kecilnya.⁴

⁴ Jurnal Astim Riyanto, 2006, *Budaya Politik Indonesia*, (20-08-2018)

2.4 Model – Model Masyarakat

Model masyarakat adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner yang saya lakukan, terdapat beberapa model-model dalam masyarakat diantaranya:

1. Masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan paling purba dalam sejarah perkembangan masyarakat. Kata miskin sendiri secara sederhana berarti kondisi atau keadaan tidak berharta (harta seseorang yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari), serba kekurangan. Kondisi kemiskinan yang sampai hari ini tidak kunjung selesai sebab memiliki problematika dan dinamika tersendiri dalam masyarakat. Terlebih kemiskina termasuk dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu tatana pola masyarakat.⁵

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan dan orientasi bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosilaisasi diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui montak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang atau individu berada. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh interaksi, pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi individu menerima rangsangan-rangsangan politik.

Sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik kenegaraan. Alasannya karena sosialisasi politik itu berfungsi untuk memelihara agar agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif. Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur politik yang ada. Selain itu juga sosilaisasi politik juga menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik. Untuk menyampaikan pandangan, nilai, sikap, dan

⁵ Chavchay Syaifullah, 2008, *Generasi Muda Menolak Kemiskinan*, IKAPI : PT. Cempaka Putih, hlm. 11.

keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana atau agen-agen sosialisasi politik, salah satu agen sosialisasi politik adalah keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Di sebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, lembaga pendidikan inilah yang pertama ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Peran keluarga dalam mensosialisasikan proses politik merupakan hal yang sangat penting. Orang tua sebagai panutan dan sumber informasi yang dibutuhkan seorang pemilih pemula karena pemahaman dan pengetahuan politik pemilih pemula dinilai kurang jika tidak ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang ditanamkan oleh orang tua⁶

3. Membudaya (penyakit masyarakat yang sudah terbiasa)

Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

Dengan adanya *money politic*, akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih caleg. Pemilu, tidak lagi jujur, artinya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara membeli suara. Jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan

⁶ Jurnal. M Teguh Wibowo, Effendi Hasan, 2017, *Sosialisasi Politik Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga*, (18-08-2018).

melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Dan Indonesia akan semakin jauh dari sebutan Negara Demokrasi. Yang dimana fungsi dari kepemimpinan ialah, memandu, menuntun, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para masyarakatnya kejalan yang lebih sejahtera sesuai dengan tujuan yang sama, sekarang sudah susah untuk dijumpai, yang mana ketika telah mendapatkan kedudukan yang diinginkan, semua lupa dengan janji-janji yang pernah diucapkan seakan-akan tidak pernah disampaikan.⁷

4. Persamaan Suku

Indra Kesuma Nasution (2014) menegaskan bahwa di Medan, Sumatera Utara, identitas kesukuan berpengaruh terhadap partisipasi politik, terutama perilaku politik dalam Pilkada langsung 2010. Terkait pengaruh faktor kesukuan dalam Pilkada, Edward Aspinall (2011) menjelaskan bahwa identitas kesukuan dalam pertarungan politik Pilkada digunakan dalam tiga hal, yaitu dalam memobilisasi simbol kesukuan, menjadi pertimbangan pemilih, dan seleksi dan strategi kandidat pemimpin (seperti putra daerah).

Di dalam masyarakat multietnis dengan ikatan erat pada masing-masing etnis, persaingan dalam politik Pilkada tersebut tidak dapat mencegah munculnya politik identitas kesukuan. Dengan adanya ikatan yang erat pada identitas etnis, hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan pertimbangan politik mereka. Artinya, sulit dibayangkan bahwa masyarakat pemilih tidak menghiraukan latar belakang suku pasangan calon pemimpin daerah. Perilaku pemilih yang bergantung pada identitas politik kesukuan ini dianggap tidak rasional. Di Bengkulu, selama Pilkada langsung pertama dan kedua, politik identitas kesukuan diduga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kewenangan sa;ah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur⁸

5. Pemikiran yang lebih maju

Pilkada serentak yang segera digelar akan kembali menguji kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan rasional dibanding latar belakang primotdial dari calon pemimpin daerahnya, pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah

⁷ Kartini Kartono, 1990, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 61.

⁸ Jurnal Idris Hemay, Aris Munandar, 2015, *Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih*, (23-08-2018).

yang memang harus melayani semua kelompok dari pada kepentingan agama atau etnis tertentu.

Hal yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah publik berharap pelaksanaannya pilkada tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik. Karena kepala daerah terpilih nantinya terutama diharapkan juga dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, usaha kecil menengah, memperbaiki infrastruktur visi misi pasangan calon ditaati dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi.

Keinginan dari publik mendapatkan kepala daerah yang melayani masyarakat tentu akan bergantung pada para pemilihnya. Apakah mereka dengan mudah tergoda oleh politik uang, emosional primordial atau mempengaruhi pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya⁹

6. Masyarakat Apatisme

Banyak kalangan yang pesimis terhadap pemilu sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Persis seperti yang alami oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ketika pemilihan umum semakin dekat. Hal ini memang menjadi fenomena musiman menjelang pelaksanaan pemilu. Fenomena apatisme publik ini tek lepas dari pola perilaku elektoral rakyat Indonesia sendiri yang kerap kali terjebak dalam politik pragmatis. Dalam pelaksanaan demokrasi, apatisme publik yang ditunjukkan oleh masyarakat kita menggambarkan suramnya masa depan. Melukiskan ketidakberdayaan mereka dalam menentukan sendiri masa depan. Seolah-olah pasrah menggantungkan segala asa pada orang lain yang belum tentu ia kenal dalam menentukan pemimpinnya. Padahal, demokrasi seharusnya dipandang sebagai ujud pelaksanaan amanah. Vaik amanah rakyat dalam memilih pemimpin demi kebaikan mereka semua, ataupun amanah pemimpin terpilih untuk mengayomi rakyat yang telah memilihnya.

Seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap arga negara terhadap negaranya, pemerintahannya, pemimpin politik dan lain-lain. Selanjutnya demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam ikhtiar penelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

⁹ Jurnal Pratiwi Tedjo, 2018, *Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan*, (24-08-2018).

¹⁰ Jurnal Reza Fahmi, 2014, *Pengaruh Pendidikan Politik Dan Kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatisme Pemilih Dalam Pemilu 2014*, (24-08-2018).

2.5 Pembagian Masyarakat

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam:

- a. Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawaran, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya kedalam (kelompoknya) bersifat *Gemeinschaft* keluar bersifat *Gesellschaft*.
- b. Masyarakat merdeka yang terbagi dalam:
 1. Masyarakat alam yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya. Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar umumnya bersifat *Gemeinschaft*.
 2. Masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagainya umumnya bersifat *Gesellschaft*.¹¹

2.6 Ciri-ciri kelompok dalam Masyarakat

Menurut Kartono, ada beberapa ciri-ciri kelompok sosial, yaitu:

- a. Terdapat golongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain
- b. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat didalamnya.
- c. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing
- d. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengaturinteraksi dalam dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada
- e. Adanya pergerakan yang dinamik¹²

2.7 Ciri-ciri Masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ada interaksi antara sesama anggota masyarakat

Di dalam masyarakat terjadi interaksi sosial yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan, antara kelompok-kelompok,

¹¹ Jurnal Ayu Senja Mayangsari, 2017, *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*, (14-09-2018).

¹² Jurnal Digilib Uinsby, 2011, *Pengertian Kelompok Sosial*, (13-09-2018).

maupun antarperseorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial harus ada dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi.

b. Menempati wilayah dengan batas-bata tertentu

Suatu kelompok masyarakat menempati suatu wilayah tertentu menurut suatu keadaan geografis sebagai tempat tinggal komunitasnya, baik dalam ruang lingkup yang kecil (RT/RW), desa, kecamatan, kabupaten. Propinsi, dan bahkan negara.

c. Saling tergantung satu dengan yang lainnya

Anggota masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dan saling melengkapi

d. Memiliki adat istiadat/budaya tertentu

Adat istiadat dan budaya diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang mencakup bidang yang sangat luas diantara tata cara berinteraksi antara kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat, apakah itu dalam perkawinan, kesenian, mata pencaharian ataupun sistem kekerabatan dan sebagainya.

e. Memiliki identitas bersama

Suatu kelompok masyarakat memiliki identitas yang dapat dikenali oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menopang kehidupan dalam bermasyarakat yang lebih luas. Identitas kelompok dapat berupa lambang-lambang, bahasa, pakaian, simbol-simbol tertentu dari perumahan, benda-benda tertentu, seperti: alat pertanian, senjata tajam, kepercayaan dan sebagainya.¹³

2.8 Fungsi Sosial Masyarakat

Secara garis besar, kita tahu bahwa nilai sosial mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai berikut.

a. Petunjuk arah dan pemersatu

Apakah maksud nilai sebagai petunjuk arah? Cara berfikir dan bertindak anggota masyarakat umumnya dioarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Pemandang barupun secara moral diajibkan mempelajari aturan-aturan sosio budaya masyarakat yang didatangi, mana yang dijunjung tinggi dan mana yang tercela. Dengan demikian, dia dapat menyesuaikan diri dengan norma, pola pikir, dan tingkah laku yang diinginkan, serta menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan

¹³ Jurnal Dodiet Aditya, 2012, *Konsep Dasar Masyarakat*, (12-09-2018).

masyarakat. Nilai sosial yang berfungsi sebagai pemersatu yang dapat mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, nilai sosial menciptakan dan meningkatkan solidaritas antarmanusia. Contohnya nilai ekonomi mendorong manusia mendirikan perusahaan-perusahaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

b. Benteng Perlindungan

Nilai sosial merupakan tempat perlindungan bagi penganutnya. Daya perlindungan begitu besar, sehingga para penganutnya bersedia berjuang mati-matian untuk mempertahankan nilai-nilai itu. Misalnya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti budaya minum-minuman keras, diskotik, penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila seperti sopan santun, kerja keras, ketuhanan, saling menghormati dan menghargai merupakan benteng perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia dari pengaruh budaya asing yang merugikan.

c. Pendorong

Nilai juga berfungsi sebagai alat pendorong (motivator) dan sekaligus menuntut manusia untuk berbuat baik. Karena ada nilai sosial yang luhur, muncullah harapan bagi dalam diri manusia. Berkat adanya nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai cita-cita manusia yang berbudi luhur dan bangsa yang beradab itulah manusia menjadi manusia yang sungguh-sungguh beradab. Contohnya nilai keadilan, nilai kedisiplinan, nilai kejujuran, dan sebagainya.¹⁴

2.9 Proses Terbentuknya Kelompok dalam Masyarakat

Proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama, itulah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat binatang. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurnya secara biologis untuk hidup berkelompok.

Ada dua hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu:

- a. Hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia di sekitarnya
- b. Hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya.¹⁵

¹⁴ Jurnal Digilib Uinsby, 2011, *Nilai-Nilai Sosial*, (15-09-2018).

¹⁵ Jurnal Digilib uinsby, 2011, *Pengertian Kelompok Sosial*, (15-09-2018).

2.10 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, maupu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Mengingat hal itu maka dilakukanlah pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan maksud mengangkat pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan inilah yang biasa disebut sebagai pilkada. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah selalu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap Provinsi. Dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi. Dan semua sudah di atur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dalam penyelenggaraan pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut:

Dalam Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ali Moertopo sendiri pilkada pada hakekatnya adalah sarana. Yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya pilkada merupakan suatu Lembaga Demokrasi yang *digunakan* untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, DPRD. Yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Perubahan UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan RI. Salah satunya adalah ketentuan yang menyangkut pemerintahan daerah. Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal baru Pasal 18 adalah :

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menerus asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2))
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5))
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1))
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2))
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1))
6. Prinsip badan perakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu (Pasal 18 ayat (3))
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2))¹⁶

2.11 Sistem Pemilihan Umum

Sebelum mengurai berbagai macam ragam sistem pemilu berikut dengan variasi-variasinya, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa apapun sistem pemilihan tersebut, ia tidak akan terlepas dari pencapaian tujuan sebuah sistem pemilu yaitu, untuk menentukan mayoritas yang layak memerintah dan untuk sadapat mungkin mewujudkan dalam lembaga perwakilan sebagaimana yang ada dalam partai. Sistem pemilu akan selalu berada pada ranah tarik menarik antar adua tujuan diatas. Sistem manapun yang akan dipilih, ia akan mempunyai kecenderungan pada salah satu dari tujuan tersebut. Dengan demikian, secara umum, ada empat kelompok besar sistem pemilu yang digunakan negara-negara dunia. Keempat ragam sistem pemilu tersebut memiliki variannya masing-masing.

a. Sistem Distrik

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sistem distrik ditandai dengan ciri bahwa satu daerah pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di parlemen. Dalam sistem ini, calon dalam satu distrik yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang sekalipun bukan peraih suara mayoritas. Sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi bagaimanapun kecil selisih kekalahannya.

b. Sistem Proporsional

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam suatu wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Tingkat

¹⁶ Suharizal, 2011, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

proporsionalitas suara dan peroleh kursi menunjukkan bahwa dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini memusatkan pada pencakupan suara minoritas, membedakannya dengan sistem distrik yang lebih menekankan pada tertib pemerintahan.

c. Sistem Campuran

Sistem campuran ini disebut juga dengan sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada diantara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas. Tujuan dari sistem campuran ini adalah untuk memadukan ciri-ciri positif dan sistem mayoritas-pluralis dan sistem proporsional.. Dengan demikian, pada sistem ini akan terdapat dua sistem pemilu yang jalan beriringan, meski masing-masing menggunakan metodenya sendiri.¹⁷

2.12 Azas-azas Pilkada

Sejalan dengan pengembangan demokrasi di tingkat lokal maka Pilkada menghendaki dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apa yang dimaksud dengan asas pemilihan Pilkada yang bersifat *umum* pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang pemilu maupun Pilkada berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum ini mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpaara langsung sesuai dengan hat diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Dalam PP No. 6 tahun 2005 Bab I Ketentuan Umum ayat 5 menyebutkan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau yang sudah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

Yang dimaksud langsung adalah rakyat pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara. Sedangkan pengertian *bebas* adalah tiap arga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Sementara yang dimaksud *rahasia* adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui olehh pihak manapun dan dengan

¹⁷ Khairu Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hml. 76.

jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Sedangkan pengertian jujur adalah setiap penyelenggaraan Pilkada, aparat pemerintah, pengawas Pilkada, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud *adili* adalah setiap pemilih dan peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari keungan pihak mana pun.¹⁸

2.13 Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Manfaat dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berarti kegunaan, pengontrol, serta yang menunjukkan bahwa demokrasi terletak ditangan rakyat. Diantaranya ada lima manfaat Pemilihan Kepala Daerah:

1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat bisa menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan.
2. Pilkada juga dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat bisa memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya.
3. Pilkada juga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif bisa memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali, atau bahkan sebaliknya, kalau misalnya rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.
4. Pilkada juga bisa menjadi sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pemberian suara pada dasarnya merupakan mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin. Yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat.
5. Pemilu juga bisa dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Sehingga rakyat bisa secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

¹⁸ Gregorius Sahdan, Muhtar Haboddin, 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia* , Yogyakarta , Anggota IKAPI, hlm. 204.

2.14 Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya.¹⁹

Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

2.15 Tahapan Pilkada dari segi Politik “Electoral Process”

Politik Electoral adalah pemberi suara (*electoral votes*) untuk calon kepala daerah mewakili pemilih dan partainya. Secara garis besar ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan Pilkada.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

1. KPUD menetapkan perencanaan penyelenggaraan Pilkada melalui penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Semua tahapan ini tarangkum secara rinci dalam bab III Penyelenggaraan Pemilihan PP 5 tahun 2005
2. Pembentukan panitia panwwas Pilkada. Panitia panwas dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
3. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada pemerintahan daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah .

Persoalan dana merupakan persoalan paling krusial dalam Pilkada karena harus dibicarakan antara pihak eksekutif, legislatif, dan KPUD. Pihak legislatif harus tahu karena bagian dari mitra eksekutif. Sebagai mitra sudah tentu akan diajak bicara oleh pihak eksekutif mengingat dana penyelenggaraan Pilkada diambil dari APBD. Karena sumbernya dari APBD, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.²⁰

2.16 Bentuk Kecenderungan Masyarakat Dalam Pilkada

Kecenderungan berarti kecondongan hati, kesudian, keinginan atau kesukaan, bila dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah ialah, bahwa masyarakat memiliki hak tersendiri untuk memutuskan siapa yang akan dia pilih dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dan tidak ada yang bisa melarang karena setiap masyarakat mempunyai sisi pandang yang berbeda terhadap orang-orang yang terjun dalam dunia politik atau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

1. Adanya rasa tidak puas sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki atas keadaan dan situasi yang ada. Dalam artian seperti pemimpin yang sudah-sudah, yang dimana hanya menaburkan janji-janji semata, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki keadaan dalam masyarakat, baik dari segi pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan, maupun kesejahteraan. Sehingga dengan adanya pemilihan kepala daerah yang baru, masyarakat berharap penuh kepada pemerintah agar apa yang diinginkan oleh masyarakat selama ini dapat terealisasikan dengan semaksimal mungkin nantinya dan tidak lagi menimbulkan luka lama yang belum sempat terobati pada masa lalu.

²⁰ Gregorius Sahdan, Haboddin Muhtar, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, (Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2009), hlm. 207

2. Adanya kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Kesadaran ini mendorong masyarakat melakukan berbagai usaha memperbaiki kekurangan dalam kebudayaannya. Maksudnya dalam bidang kebudayaan, yang dimana mungkin selama ini kurangnya perhatian dari pemerintah dibagian kebudayaan seperti kesenian, sehingga kurang terpopulerkan baik dalam masyarakat itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki keadaan serta besar harapan dengan masing-masing calon kepala daerah tersebut agar kebudayaan sendiri jangan sempat terabaikan lagi.
3. Pertumbuhan masyarakat menyebabkan timbulnya keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Karena itu, masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Maksudnya ialah dengan bertambahnya pertumbuhan setiap masyarakat tentunya semakin besar keperluan dan biaya kehidupan, sehingga dengan adanya pemimpin yang baru masyarakat berharap agar pemerintah membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, agar nantinya pengangguran tidak semakin bertambah.
4. Adanya kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat mencari cara baru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Maksudnya ialah yang dimana selama ini kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan oleh pemerintah seperti tempat tinggal atau tempat berlindung yang layak, sehingga dengan pemilihan kepala daerah yang baru bisa memberikan kehidupan yang lebih baik serta peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat selama ini, dan bukan hanya janji-janji belaka saja yang disampaikan.
5. Bertambahnya kebutuhan hidup yang didukung oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup lebih sejahtera. Masyarakat berharap dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang setiap hari semakin meningkat bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Menurut teori psikologi tingkah laku pemilih ada beberapa faktor yang dominan yang mempengaruhi dan menentukan pilihannya. Faktor dominan tersebut meliputi: media, status dan kelas sosial, pimpinan partai, umur, pendidikan, agama, etnis, gender, wilayah asal usul pemilih dan yang terakhir adalah hasil *pooling*.

Kecenderungan dalam pilkada langsung adalah terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung kandidat. Landasan koalisis bisa berupa faktor teknis, karena kurang memenuhi syarat untuk mengajukan kandidat sendiri. UU No. 32 Tahun 2004 mensyaratkan baha partai politik yang hendak mengajukan calon memiliki minimal 15% suara atau kursi. Syarta ini membuat banyak partai melakukan koalisi. Koalisi juga dibangun

berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Dengan melakukan koalisi dengan banyak partai, diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar, dengan banyaknya partai pengusung calon, massa pendukung dari masing-masing partai diharapkan juga akan mendukung calon yang diajukan.

Namun sayang, dalam berkoalisi partai-partai politik cenderung pragmatis. Koalisi yang mereka bangun bukan berlandaskan kesamaan visi-misi, *platform*, dan program, namun berdasarkan kepentingan jangka pendek merebut kekuasaan. Tidak heran, koalisi yang terbentuk bersifat pelangi dan gado-gado.

Terdapat sejumlah kelebihan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diantaranya:

1. Memutus politik oligarki oleh sekelompok elit politik dalam penentuan kepala daerah
2. Memperkuat *checks* dan *balances* dengan DPRD
3. Legitimasi yang kuat, karena langsung mendapat mandat dari rakyat
4. Menghasilkan kepala daerah yang akuntabel
5. Menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsi terhadap tuntutan rakyat.²¹

²¹ Jurnal Lili Romli, 2008, *Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada*, (30-07-2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat dan sumber penelitian yang ingin diteliti dan mempunyai nilai guna untuk menyelesaikan proposal ilmiah ini. Lokasi penelitian yang ingin diteliti di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro Makmur, dan Kecamatan Danau Paris.

3.2 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat mendeskripsikan dan lebih cenderung menggunakan analisis. Penggunaan data kualitatif tersebut dimaksud untuk mempertajam dan sekaligus memperkaya analisis kualitatif itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikatif kualitatif.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di ambil bersifat deskriptif, yang berarti menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, sehingga dapat menjadi gambaran tentang kondisi yang terjadi.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data dari hasil amatan langsung (observasi), sehingga dapat diuraikan dan diringkas mengenai objek penelitian dan berdasarkan data primer. Observasi merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung yang dapat dirasakan langsung oleh alat-alat indera seperti mata dan alat indera lainnya.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berupa opini orang yang secara individual maupun kelompok.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses untuk memperoleh data diantaranya ada dua yaitu:

1. Observasi

Observasi pengambilan data secara langsung terhadap subjek yang akan diamati. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipant. Dimana peneliti ikut serta terlibat menanyakan atau mewawancarai para khalayak (masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan secara lisan dan tatap muka terhadap responden atau subjek peneliti. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survei. Berikut adalah nama-nama reseponden (Dewi, Upik Bugis, Aswidar, Sese, Andriani, Ani, Ida, Ali, Andi, Putra, Agus, Ria, Evi, Erna, Hamzah, Mawar, Santi, Aida, Nasep, Zamzami, Sartun, Lasmini, Foniem, Faini, Fitri, Hamdiani, Fazna, Bakti, Iqbal dan Saydah).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan diperoleh ini dilakukan dengan cara data kualitatif, dengan teknik deskriptif. Kemudian hasil analisis tersebut ditarik kesimpulannya dengan hasil pengamatan yang diteliti secara langsung dan juga dibantu dengan studi perpustakaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terletak di Pesisir Pantai Barat Sumatera dengan luas wilayah 2.187 Km² terletak di 2° 02' - 2° 27' 30" Lintang Utara / 97° 04' - 97° 45' 00" Bujur timur yang berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam disebelah Utara, Samudera Indonesia disebelah Selatan, Provinsi Sumatera Utara disebelah Timur dan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan disebelah Barat.

4.1.2 Sejarah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.¹

Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari "*sekel*" yang artinya "*mau*" ada pula yang mengatakan bahwa pada awalnya daerah ini bernama "*Singkir*" (R) bukan Singkil (L) Dipameokan begitu karena letaknya yang amat jauh dari Banda Aceh. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa arti Singkil adalah pertama berasa tidak enak pada pendengaran (seperti ketika mendengar seseorang mengikis besi, ngilu) kedua Singkil adalah tali ikat pinggang yang biasa dipakai oleh perempuan yang sedang hamil.

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil di fungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga

¹ Jurnal: Okta Kurniawan TB, Sirojuzilam: *Analisi Pusat Pertumbuhan Kabupaten Aceh Singkil* (05-08-2018)

Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Kapan kota Singkil pertama sekali di bangun bukanlah hal yang mudah untuk memastikannya. Diperlukan berbagai pendekatan terutama melalui pendekatan sejarah dan dilanjutkan dengan pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman yang ditemui dari alam dan hasil penemuan – penemuan melalui sebuah penelitian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pakar terutama dalam bidang arkeologi dan paleontologi yang mengkaji asal – usul manusia, warna kulit, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.

Seperti tersebut dalam sejarah bahwa Syeikh Abdurra'uf As-Singkily lahir pada tahun 1615 M atau 1024 H. Apabila dikaitkan dengan kelahirannya maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa kemungkinan Singkil telah dibangun pada tahun tersebut atau abad sebelumnya.

Menurut legenda asal-usul Singkil itu dari tiga tempat yaitu dari kampung Gelombang di alur lae soraya, Simpang Kiri. Simpang kiri adalah daerah yang pertama kali terhempas oleh gelombang pasang naik dan sebagai muaranya adalah kuala kepeng. Akibat erosi sungai, lama kelamaan menimbulkan tanah yang muncul kepermukaan sehingga sungai menjadi dangkal dan beralih ke daerah lain. Akibat dari erosi sungai tersebut muncula daerah Paya Bumbang, Rantau Gedang, Teluk Ambun, Kuala Baru, dan kampung Singkil lama. Menurut cerita kampung Singkil lama sudah tenggelam, kampung ini dahulu terletak di seberang kilangan yang bernama Pasir Tengah. Pada hari jumat terjadi amukan Hindia (lautan Indonesia), terjadi pergeseran dilaut yang begitu cepat, gelombang besar menghantam pantai pelabuhan singkil sehingga hilang dari permukaan, warga yang selamat dari amukan gelombang pindah ke daerah singkil yang ada sekarang, yang oleh belanda di namakan new Singkil di sekitar pasir tengah apabila terjadi pasang surut akan tampak batu – batu bekas peninggalan jaman dahulu.

Seorang pencatat bangsa portugis bernama *Tome Pires*, menulis buku laporan mengenai Nusantara dari tempat tinggalnya di malaka antara tahun 1512 – 1515 M, dia menulis mengenai pantai barat sumatra seperti pariaman minhak baras (Nias) dan baruus (Barus). dia juga menulis tentang kerajaan *ching guele* atau *Quencel* (Singkil). Dia menyebut bahwa kerajaan singkil berbatasan dengan barus, disebelah utara berbatasan dengan kerajaan mencopa atau daya (Aceh Barat). Aceh singkil pada waktu itu belum beragama kerajaan singkil waktu itu banyak menghasilkan damar, lada, emas. Singkil mempunyai perahu yang laju, dan ada sungai-sungai. Kerajaan singkil melakukan hubungan dagang dengan pasai,

barus, dan pariaman. Perkembangan kota singkil selanjutnya bagaikan sebuah drama yang meninggalkan sebuah tragedi yang memilukan. Saat kota singkil berada pada perkembangan ekonomi yang sangat pesat, tiba-tiba pada tanggal 12 february 1861 kota singkil hancur karena dilanda gempa bumi (tektonik). Dan gelombang yang sangat dahsyat. Daerah lainya dipantai barat Aceh yang dilanda gempa bumi yang hebat adalah meukhik, susoh dan kuala bate. Gempa bumi telah mengakibatkan hancurnya semua inprastruktur yang dibangun pemerintah belanda sebelum tahun 1822.

Pada masa klonel singkil pernah dipimpin oleh raja yang bernama *lebai depa*. Pada mulanya raja ini menerima kehadiran belanda disingkil, bahkan ia memperlakukan belanda secara istimewa karena janji belanda yang menyanggupi membantu singkil untuk melepaskan diri dari kekuasaan kesultanan Aceh. Janji belanda tersebut hanya tipu muslihat saja pada tanggal 14 maret 1672 singkil dipaksa untuk menanda tanda tangani perjanjian *belateral* yang sangat merugikan yaitu bahwa kerajaan singkil harus setia sepenuhnya kepada belanda, semua hasil bumi harus dijual kepada asosiasi dagang belanda (VOC) dengan harga yang ditentukan Belanda.

Sekitar abad ke 17 asosiasi dengan inggris *East indian company* memasuki wilayah Singkil. Inggris lantas merampas hasil bumi yang sudah menjadi wewenang belanda. Memasuki abad ke18 singkil tidak lagi loyal kepada belanda. Hal ini disebabkan karena kapal – kapal dagang inggris dan amerika mulai berdatangan. Kedua negara itu menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli sehingga belanda mulai tersingkir dari singkil. Namun singkil lebih memilih bangsa amerika untuk menjual hasil buminya karena amerika mampu membeli dengan harga yang lebih mahal. Pada suatu waktu pedagang amerika melakukan penipuan, hasil bumi yang telah diserahkan oleh orang singkil tidak di bayar. Rakyat singkil marah dan menyita sebuah kapal amerika. Membalas tindakan ini presiden amerika mengirim kapal perang *Potomac* pada tahun 1931 dan menyerang singkil.

Pada masa pendudukan jepang rakyat singkil sangat menderita. Kerja paksa rakyat singkil dalam membangun jalan runding / sidikalang telah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Rakyat juga kekurangan makanan, pakaian dan menderita penyakit malaria. Bahan makanan sangat langka karena bahan makanan banyak yang di ambil oleh jepang untuk kebutuhan serdadu nya dan selebihnya di buang ke laut, rakyat hanya di beri makanan yang sangat terbatas. Pakaian tersebut terbuat dari kulit kayu dan getah. Pakaian kulit kayu tidak saja dipakai untuk pakaian sehari – hari tetapi juga dipakai untuk naik pelaminan dan kain kapan. Rakyat yang berbgabung dalam keibodan (*hansip*, sekarang) di paksa untuk jaga

malam di tepi pantai agar cepat di ketahui jika ada serangan musuh (*sekutu*). Selain itu juga bekerja menggali parit – parit pertahanan. Apabila ada pejabat atau tokoh masyarakat yang mencoba membela kepentingan rakyat maka di tempeleng dan di tangkap untuk disiksa dengan alasan mata – mata sekutu. Setiap pegawai dan anak – anak sekolah bahkan masyarakat bisa pada setiap pagi mengikuti upacara dan di haruskan membungkuk (*seikerei*) kepada dewa matahari tersebut (*tenno haika*) raja *syowa*, sebagai penghormatan.

Kota Singkil amat menarik untuk di kaji baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdasarkan sejarah kota singkil pernah mengalami kejayaan terutama di bidang ekonomi pada sekitar awal abad ke 18. Ketika itu kota singkil menjadi bandar (pelabuhan) di bagian pantai selatan aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan. Pada saat itu segala perdagangan lada, damar, sutra emas, dan hasil rempah – rempah yang akan di ekspor ke amerika sekrikat, harus melalui pelabuhan singkil, sehingga kota singkil menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat mencari pekerjaan. Kapal –kapal inggris dan amerika berdatangan ke singkil. Kedua negara ini menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli, sehingga belanda tersingkir dari singkil. Pada waktu itu pelabuhan utama singkil ada di tiga tempat di sebelah utara ditarik garis sampai ke barat ujung bawang, di sebelah timur pohon yang tinggi di sebelah barat ke arah selatan adalah bekas jalan ke singkil (depan benteng singkil).

4.2 Penyebab terbentuknya Model Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil Tahun 2017

4.2.1 Kurangnya Penegakan Hukum

Hukum sebagai *sosial engineering* atau *sosial planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendakai atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengarur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum pedaradilan serta administrasi keadilan . Penegakan hukum merupakan tugas efektif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

Aksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peranan (hukum)n sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).²

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang warga masyarakat Desa Gosong Telaga Utara. Kabupaten Aceh Singkil. Fazna Agustin, ia mengatakan:

Jika kita berbicara masalah hukum maka kita juga berbicara masalah negara, karena negara dibentuk atas landasan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana sifat hukum tersebut bersifat memaksa, yang artinya bahwa hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa ada perbedaan, baik dalam konteks golongan elit dan golongan masyarakat biasa, dan hukum selalu melekat pada manusi pada bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum, maka disamping itu juga hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sebagai sarana penggerak pembangunan dan sebagai fungsi kritis. Serta didalam menjalankan hukum tersebut sangat diperlukan peran dari pemerintah agar hukum yang dibuat bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin (wawancara 01 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan yang bahwa, salah satu modal penting dalam menjalankan hukum adalah dibutuhkannya peran pemerintah agar hukum yang dibuat bisa direalisasikan dengan baik, dan hukum juga bersifat memaksa, yang dimana bahwa hukum tersebut berlaku bagi semua rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan baik suku, ras, bahasa, maupun agama, serta dengan adanya hukum tersebut segala permasalahan yang ada mampu ditertibkan dan diselesaikan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibuk Andriani warga Desa Takal Pasir. Kecamatan Singkil. Kabupaten Aceh Singkil. Ia mengatakan:

Sesungguhnya bila berbicara masalah hukum, maka kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri sudah sejauh mana kita menaati hukum yang ada, karena bila dilihat hukum itu hanya berlaku bagi kalangan-kalangan kelas bawah, disebabkan karena kalangan-kalangan kelas bawah tidak mampu membeli hukum tersebut bila dibandingkan dengan orang-orang kalangan atas yang menghalalkan segala cara untuk melepaskan diri dari aturan-aturan hukum yang berlaku. (wawancara 02 Mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas memberikan gambaran yang bahawa hukum itu hanya berlaku bagi kalangan kelas bawah, tidak halnya dengan kalangan atas atau golongan-

² Jurnal, R Bayubroto, *Penegakan Hukum*, 2009 (24-08-2018)

golongan orang yang mempunyai kekuasaan (orang elit), disebabkan bahwa orang-orang golongan kelas bawah tidak mampu membeli hukum yang ada.

Sebenarnya, hukum berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, tanpa ada perbedaan sedikit pun, tetapi yang dilihat sekarang sangat jarang yang menaati hukum tersebut contohnya, didalam Pemilihan Kepala Daerah masih terdapat praktik politik uang, sedangkan politik uang tidak diperbolehkan adanya dalam negara demokrasi.

Sebagaiman hasil wawancara penulis dengan Ibuk Erna warga Desa Siompi. Kecamatan Suro Makmur. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan adanya keadilan didalam masyarakat untuk mendapatkan bagian yang sama. Dan pada akhirnya dapat terwujud dan terlaksana suatu tujuan yang diharapkan. Dengan adanya hukum ini segala sesuatu permasalahan yang ada didalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih terarah. Dan karena itu hukum berlaku untuk semua orang baik dari golongan orang kaya, miskin, maupun dari golongan orang tengah. (wawancara 03 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum dibentuk agar segala sesuatu kebijakan yang dibuat didalam suatu negara agar lebih terarah, jika salah seorang dari warga tersebut melanggar hukum yang telah dibuat.

Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan dari pada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem Undang-Undang. Dalam sistem Undang-Undang terdapat ruangan kosong apabila sistem Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibuk Upik Bugis warga Desa Takal Pasir. Kecamatan Singkil. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu mempunyai hubungan kepentingan. Yang dimana kepentingan-kepentingan ini bisa sangat berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, damai, adil, dan makmur. Tetapi yang kita lihat sekarang ada juga yang salah menggunakan hukum dan bahkan salah mengartikan hukum itu. (wawancara 04 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia dan bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tidak terhingga, maka dari itu hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur

pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat itu.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dan masyarakat. Hukum juga menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Serta hukum juga memaksa agar peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakatnya.

4.2.2 Kurangnya Pengawas Oleh Aparat Penegak Hukum (PANWASLU)

Substansi demokrasi dalam pembentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana amanat pasal 18 ayat (4) yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung, merupakan *raison de etre* yang menjadi esensi dasar demokratisasi penyelenggaraan pemerinthan daerah. Evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tahun 2014-2015, melahirkan pandangan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini, diliputi oleh maraknya berbagai permasalahan yang tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut menjadi dasar pijak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *uo*, dengan kerangka dasar yaitu pemisahan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah terhadap peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Pilkada, dengan sasaran yaitu mewujudkan penyelenggaraan Pilkada secara demokratis berdasarkan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kemandirian dan kredibelitas penyelenggaraan Pemilu untuk mewujudkan integritas proses dan hasil Pilkada.

Upaya mengatasi permasalahan di atas menjadi landas pijak penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari deligitimasi pproses dan hasil Pemilu, sertaantisipasi perkembangan berbagai tindak penyelenggaraan berdasarkan tata hukum, secara perkuatan kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan sistem kepemiluan. Keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Pemikiran meruipakan dasar pijak upaya pembenahan secara mendasar aspek-aspek tata

laksana, hubungan kewenangan antar penyelenggaraan Pemilu dan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, sehingga menghadirkan berbagai ketentuan baru yang belum pernah terdapat pada sistem perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang sistem p-enyelenggaraan Pilkada.³

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Sartun, salah seorang warga Desa Sidorejo. Kecamatan Gunung Meriah. Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut pandangan saya Panitia Pengawas Pemilu masih sangat kurang dalam menangani dan mengontrol proses Pemilihan Kepala Daerah, seperti halnya dilapangan yang masih terdapat kecurangan dalam perhitungan suara dan bahkan juga pembelian suara masyarakat yang digantikan dengan pemberian uang dengan tujuan bisa memenangkan dalam Pemilihan nantinya. Bahkan bila dilihat sampai sekarang kecurangan-kecurangan seperti ini masih saja terjadi baik dilapangan maupun diluar lapangan, dan seharusnya Panitia Pengawas Pemilu yang dipilih yang memang betul-betul paham akan tugas dan wewenang dalam pemilu tersebut. (wawancara 05 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa, adanya kekecewaan masyarakat kepada Panitia pengawas Pemilu, yang dimana didalam proses pemilihan tersebut, selalu terdapat kecurangan dan bahkan kesalahan baik didalam perhitungan suara maupun dalam prosos mencoblosan, dan disini sangat kurangnya Panitia Pengawas Pemilu dalam menangani dan mengontrol dalam prosos pemilihan tersebut, dan seharusnya Panitia Pengawas Pemilu tersebut dipilih yang memang betul-betul mampu dan bertanggungjawab dalam menyukseskan pemilihan tersebut, agar kecurangan-kecurangan yang pernah ada dalam pemilihan tersebut tidak terulang kembali.

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimana permasalahan seperti ini membuat masyarakat bimbang dalam mengikuti perkembangan politik karena permasalahan didalam proses perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah terus berlanjut. Dan mungkin hal-hal yang terjadi seperti ini pasti ada permainan politik didalam proses pemilihan, sehingga hal-hal tersebut masih terus berlanjut.

4.2.3 Masyarakat Aceh Singkil Masih Awam

³ Jurnal Erwin Prima Rinando, 2016, *Penguatan Kelembagaan Pengasa Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (26-08-2018).

Di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan lain-lain. Sebagai sosiolog dia sekaligus merupakan anggota salah satu kelompok sosial. Ilmuwan penelitian akan kian sadar bahwa sebagian dari kepribadiannya terbentuk oleh kehidupan berkelompok dan dia hanya merupakan unsur yang mempunyai kedudukan dan peranan kecil. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul dengan kelompok-kelompok sosial lainnya diluar rumah. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam kativitas maupun bentuknya. Kelompok dapat menambah alat-lat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru didalam rangka perubahan-perubahan yang di alaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit raung lingkupnya.

Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola pergaulan interaksi sosial. Pergaulan tersebut mengasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandanga tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikinya.

Secara awam masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif (sederhana). Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat. yang menguasai ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat dipungkiri masyarakat desa dinegara sedang berkembang seperti Indonesia, ukurannya terdapat pada masyarakat desa yaitu bersifat tradisional dan hidupnya masih sederhana, karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing/luar yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola hidupnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang warga masyarakat Desa Sidorejo. Kabupaten Aceh Singkil. Ibuk Lasmini, ia mengatakan:

Dalam masyarakat selalu didapatkan adanya golongan-golongan ataupun kelas-kelas dalam masyarakat, yang dimana adanya masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah, yang dimana masyarakat kelas atas ialah masyarakat yang mempunyai golongan dan kedudukan yang tinggi didalam masyarakat, sedangkan masyarakat bawah ialah masyarakat awam, yang

dimana pengertian dari masyarakat awam tersebut ialah masyarakat yang pengetahuannya masih sedikit sekali, dan biasanya masyarakat tersebut tinggal dibagian pelosok yang ada di dalam suatu Daerah tertentu. Dan masyarakat awam tersebut biasanya orang-orang yang bisa di bolak-balik dan dilibatkan dalam segala proses di dalam suatu daerah, seperti didalam Pemilihan Kepala Daerah masih banyaknya masyarakat yang menerima uang suap, tanpa memikirkan kepemimpinan selama 5 tahun, uang bisa dicari tetapi kesempatan untuk dipimpin orang yang jujur sulit didapati, terkadang pemikiran masyarakat yang masih sangat awam dan sangat pendek dalam memikirkan hal yang seperti ini, sehingga sangat jarang kita jumpai orang-orang yang memang betul-betul dalam memimpin sebuah Daerah dengan berlandaskan sikap jujur, adil, serta yang paham akan kebutuhan masyarakat, terkadang sesudah mendapatkan kursi kedudukan tersebut, yang paling diutamakan kepentingan kelompok dan bahkan kepentingan pribadi, sedangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dianggap urusan belakangan, sangat jauh panggang dari api, yang seharusnya pemerintah sebagai penyambung tangan bahkan aspirasi masyarakat belum mampu direalisasikan hingga saat ini. Dan mengapa hal-hal seperti pembelian suara masih tetap terjadi dikarenakan adanya janji-janji dari pasangan kandidat apabila setelah mendapatkan kursi dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut akan memperbaiki perekonomian masyarakat, apalagi janji tentang perbaikan ekonomi adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya, tetapi kebanyakan setelah mendapatkan kursi kedudukan tersebut, janji-janji yang selama ini disampaikan kepada masyarakat, hanyalah iming-iming saja. Dan permasalahan tentang perbedaan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan peran dari pemerintah agar orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan juga diperhatikan, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan hal-hal lainnya. (wawancara 06 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memberikan inspirasi kepada kita bahwa jangan ada perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, karena itu akan mengakibatkan gangguan dan ketegangan masyarakat itu sendiri. Dan disamping itu juga masyarakat juga membutuhkan pemimpin yang merakyat, yang memang benar-benar memperhatikan, mengontrol, dan mempedulikan setiap permasalahan yang terdapat didalam masyarakat.

Di dalam negara berkembang permasalahan seperti ini bukan merupakan hal yang asing lagi, karena masyarakat belum menemukan kepemimpinan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka mereka akan terus mencari keadilan dan kesejahteraan karena itu merupakan dambaan setiap warga negara, dan kembali lagi dengan persoalan Aceh yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup tetapi yang dapat dilihat dari puluhan tahun Indonesia merdeka, dan ternyata Aceh belum merasakan makna dari kemerdekaan dan kesejahteraan itu sendiri. Serta pengangguran dan kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, lapangan pekerjaan yang semakin menyempit dan kemudian tidak ada inisiatif untuk mengurangi kemiskinan itu

sendiri, sehingga hal-hal seperti ini terus berlanjut, serta semua orang sibuk dengan pendapatan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga menimbulkan istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan masyarakat diperhatikan pada saat-saat tertentu saja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Iqbal warga Desa Gosong Telaga. Kecamatan Singkil Utara. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Politik ialah suatu bentuk kekuasaan, yang dimana semua orang menginginkannya dan bahkan menghalalkan segala cara untuk dapat mencapainya, dan disini masyarakat awam itu disebabkan kurangnya belajar, membaca, dan bila membahas masalah politik bahkan orang-orang awam itu sendiri banyak yang tidak paham akan politik, yang tau hanya sekedar gambaran saja bahwa politik itu kotor, dan mungkin masalah lain mengapa politik ini sangat sedikit orang-orang yang mengerti karena pelajaran disekolah belum sampai ketahap itu, yang dimana lebih besarnya mempelajari masalah sejarah, ppkn dan ilmu lainnya, sedangkan untuk ilmu politik belum dipelajari, kecuali di bangku perkuliahan. (wawancara 07 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, politik itu tidak semua orang memahaminya, dan disamping itu juga belum ada dipelajari dibangku sekolah, kecuali dibangku perkuliahan.

Masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan peran dan kepedulian dari pemerintah, yang mana pemerintah juga sebagai tangan penyampai aspirasi masyarakat itu sendiri, tetapi yang dilihat seangat bertolak belakang, pemerintah yang hanya mempedulikan kelompok dan bahkan kepentingan pribadinya saja, tetapi visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dari masyarakat itu sampai sekarang belum bisa dirasakan, yang dimana janji-janji ketika Pemilihan Kepala Daerah hanyalah iming-iming saja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibuk Poniem, salah seorang warga Desa Sidorejo. Kecamatan Gunung Meriah. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Di dalam kelompok besar, pasti akan timbul kelompok-kelompok kecil,. Hal itu disebabkan karena manusia mungkin tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan manusia memiliki perlindungan dari rekan-rekannya, manusia mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam pergaulan hidup dan sebagainya. Walaupun didalam hidup berkelompo, berbangsa, dan bahkan bernegara, tingkatan maupun golongan dalam masyarakat pasi ada didapatkan. Yang dimana kelas-kelas tersebut banyak dirasakan oleh orang pedalaman didalam suatu daerah karena mereka menganggap mereka seperti disingkirkan dan tidak dipedulikan dalam masyarakat, baik dalam segi memperbaiki perekonomian, pendapatan dan bahkan tingkat kesejahteraan yang jarang mereka rasakan, mereka menganggap bahwa masyarakat hanya dibutuhkan dalam ajang-ajang yang penting saja, sebaiknya didalam masyarakat tersebut jangan ada perbedaan kelas-kelasa orang kaya dan orang miskin, dan permasalahan seperti ini bukanlah permasalahan yang asing lagi bila dikaji, kesenjanagan akan tetap ada hingga masa nanti, dimana orang kaya

merasa asing bergau dengan orang miskin dan begitu juga kebalikannya. (wawancara 08 Mei 2018).

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Foniem diatas, memberikan gambaran yang bahwa, masyarakat pada dasarnya hidup berkelompok, dan dengan adanya suatu kelompok maka terbentuklah sebuah masyarakat, adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang sebiior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang anggota masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat.

Hal ini apat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, dimana magra tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Demikian pula golongan pembuka tanah di kalangan orang Jawa di desa dianggap mempunyai kedudukan tinggi karena mereka dianggap sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan. Masyarakatlain menganggap kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai keduduakn yang tinggi dalam masyarakat.

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Akan tetapi, sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Adapaun proses atau lapisan-lapisan dalam masyarakat diantaranya:

1. Sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan.
2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam taung lingkup unsur-unsur antara lain:
 - a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka kejahatan), wewenang dan sebagainya.
 - b. Sistem pertanggaaan yang diciptakan para warga masyarakat (prestise dan pertanggaaan).
 - c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan.
 - d. Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.

- e. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
- f. Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajut suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik angkatan bersenjata atau perkumpulan. Kekuasaan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Unsur tersebut mempunyai sifat yang lain uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan, atau kehotmatan. Uang tanah, dan sebagainya dapat terbagi secara bebbas diantara para naggota suatu masyarakat tanpa merusak meutuhan masyarakat itu.

Akan tetapi, apabila suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi dengan teratur pula sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang dalam organisasi, secara vertikal dan horizontal. Apabila kekuasaan dan wewenang tidak dibagi secara terarur, kemungkinan sekali akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Perihal sistem lapisan yang sengaja disusun akan dibicarakan kemudian sekaligus dengan membahas unsur-unsur dan kegunaannya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang warga masyarakat Desa Sidorejo. Kecamatan Gunung Meriah. Kabupaten Aceh Singkil. Faini, ia mengatakan:

Menurut saya kahidupan didalam hidup bermasyarakat pasti terdapat perbedaan ataupun kesenjangan di dalam masyarakat itu sendiri, ada yang senang dan ada yang tidak senang, dan bahkan didalam hidup bermasyarakat tersebut pasti didapatkan yang namanya perbedaan pendapat yang terkadang sering melahirkan yang namanya konflik sosial, terkadang tujuan sama tetapi untuk mencapai tujuan tersebut yang berbeda, memang pada dasarnya hidup dalam masyarakat pasti didapatkan yang namanya kelas-kelas sosial, seperti kelas atas, menengah dan kelas bawah, jika kesenjangan ini akan tetap terjadi didalam masyarakat maka akan terus terganggu ketegangan sosial dari masyarakat itu sendiri, dan disini sangat diperlukan peran dari pemerintah agar kesenjangan-kesenjangan didalam masyarakat dapat dikontrol. (wawancara 09 Mei 2018).

Dari hasil wawancara dengan Faini diatas, memberikan gambaran yang bahwa didalam teori tentang lapisan , senantiasa djjumpai istilah kelas (*sosial clas*). Seperti yang sering terjadi dalam beberapa istilah sosiologi, istilah kelas tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut dengan *class-system*.

Artinya, semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian kelas paralel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu faktor uang, tanah, kekuasaan, atau dasar lainnya.

Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis. Sementara itu, lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (*status group*). Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan.

Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Alasannya kelas yang bersifat ekonomis di baginya lagi kedalam sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomis dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakan *Stand*.

Pada beberapa masyarakat di dunia, terdapat kelas-kelas yang tegas sekali karena orang-orang dari kelas tersebut memperoleh sejumlah hak dan kewajiban yang dilindungi hukum positif masyarakat yang bersangkutan. Warga masyarakat semacam itu sering kali mempunyai kesadaran dan konsepsi yang jelas tentang seluruh susunan lapisan dalam masyarakat. Selain itu kelas juga memengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya (*life style*) karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau atau rekreasi tertentu. Misalnya, ada perbedaan dalam apa yang telah dipelajari warga-warganya, perilakunya, dan sebagainya. Dalam masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, pernah dikenal pembedaan antara golongan yang pernah mengalami pendidikan Barat (misalnya pendidikan Belanda) dengan golongan yang tidak pernah. Di dalam mendidik anak-anak, golongan-golongan tersebut mengembangkan pola sosialisasi yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang warga masyarakat Desa Sidorjo. Kecamatan Gunung Meriah. Kabupaten Aceh Singkil. Fitri dalam wawancaranya ia mengatakan:

Masyarakat adalah orang yang hidup berkelompok, yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan interaksi dengan orang lain, karena pada dasarnya masyarakat diciptakan untuk hidup berkelompok dengan tujuan mewujudkan cita-cita dan keinginan bersama. Karena bila untuk melihat berkembang dan tidaknya suatu daerah tersebut dilihat kembali kepada masyarakatnya, dan disamping itu juga dilihat dari segi kepemimpinannya, karena seseorang pemimpin itu ditentukan dari pilihan masyarakat, guna untuk sebagai

penyambung aspirasi atau keluhan yang ada didalam masyarakat itu sendiri. (wawancara 10 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan yang bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam persaan maupun syaraf orang-orag yang bersangkutan.

Interaksi sosial antar kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Suatu contoh dapat dikemukakan dari Perang Dunia Kedua yang lalu sebagaimana dilukiskan oleh Gillin dan Gilli. Pada tanggal 7 Desember 1939, patroli Prancis telah berhadil melawan tiga prajurit Jerman. Dan interkasi sosial terjadi karena adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

4.3 Model Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017

4.3.1 Masyarakat Miskin.

Ukuran penduduk miskin yang rendah ini terkait dengan kualitas pembangunan kita yang rendah. Jika kualitas pembangunan kita tinggi, maka standar ukuran kemiskinan juga tinggi. Rendahnya kualitas pembangunan ini terlihat dari akses masyarakat miskin terhadap hasil-hasil pembangunan yang juga rendah, Itu;lah sebabnya indek pembangunan manusia Indonesia yang dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli, juga masih rendah.

Kualitas pembangunan yang rendah juga tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan yang kurang mengenai ssasaran. Selama ini, pencapaian prestasi pembangunan yang tinggi, seperti makro ekonomi yang membaik, yang diindikasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata lebih banyak

memberikan efek positif bagi perkembangan kelas menengah. Sementara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mampu sedikit mengurangi kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui program pembanguana yang jelas dan terarah, bukan semata karena terjadinya penutunan inflasi dan harga beras yang stabil. Jika pengentasan kemiskinan fokus pada stabilitas makro ekonomi, seperti penurunan inflasi, maka penurunan angka kemiskinan tidak bersifat jangka panjang. Karena ukuran kemiskinan kita sangat rendah, jika terjadi gejolak ekonomi, maka penduduk kembali menjadi miskin.

Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan daya beli. Pemerintah sesungguhnya sudah membuat program untuk itu, seperti meujudkan masyarakat yang sejahtera melalui Program Keluarga Harapan Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat. Program tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara, sehingga pelaksanaannya harus efektif dan berjalan baik. Sebab jika program tersebut bisa berjalan efektif, akan menyentuh langsung dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat kecil di pedesaan. Setidaknya pengurangan kemiskinan bisa berjalan secara kualitatif, dalam arti benar-benar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat atau meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian keberhasilan pengurangan kemiskinan bukan semata-mata karena naik turun inflasi dan harga. Sebab itu terlalu menyederhanakan masalah dan lebih baik menyentuh persoalan riil peningkatan daya beli masyarakat miskin sebagai eujud keberhasilan pembangunan nasional.⁴

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Dan kemiskinan juga suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibuk Mawar salah seorang masyarakat Desa Biskang. Kecamatan Danau Paris. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

⁴ Aunur Rofiq, 2006, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Jakarta, PT . RajaGrafindo Persada, hlm 70.

Masyarakat miskin adalah masyarakat dalam golongan kurang mampu, yang terdapat banyak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari segi pakaian, makanan, tempat tinggal, yang dimana memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memenuhi sesuatu, dan masyarakat miskin juga masyarakat dengan hidup dengan serba keterbatasan, yang bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dimana terkadang masyarakat tersebut sangat berharap kepada pemerintah setempat agar perekonomian dan lapangan pekerjaan diperhatikan agar terjaminnya kehidupan. (wawancara 11 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat berharap penuh kepada pemerintah setempat agar diperhatikan perekonomian dan pendapatan masyarakatnya, dan masyarakat juga berharap agar adanya perluasan lapangan pekerjaan, agar orang-orang tidak mempunyai pekerjaan dapat dipekerjakan dengan adanya perluasan lapangan tersebut, agar kemiskinan dan pengangguran tidak terus berlanjut, kembali lagi kepada Negara Indonesia, yang telah merdeka sudah berpuluh-puluh tahun namun, akarti dari kemerdekaan itu belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat, yang dimana kekuasaan hanya dipegang oleh para elit-elit politik saja, sedangkan masyarakat biasa tidak terlalu diperhatikan.

Peluang-peluang lapangan pekerjaan sangat sedikit sehingga masyarakat sulit untuk meningkatkan perekonomiannya, disamping itu juga kurangnya pantauan dari pemerintah terkait permasalahan yang ada didalam masyarakat, terkadang pemerintah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok saja, tanpa mengetahui peran dan tugas yang sesungguhnya bagi masyarakat. Dan sampai sekarang perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan ekonomi yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, yang dimana janji-janji manis selalu ditaburkan tanpa ada keinginan untuk mewujudkan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibuk Ani warga Desa Pandan Sari. Kecamatan Simpang Kanan. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Saya berharap kepada kepada Bupati Pak Dulmusrid, mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang pernah ada, baik dari segi pembangunan maupun kemiskinan, yang dimana perubahan-perubahan dalam visi dan misi tersebut dapat direalisasikan dengan baik dan perubahan-perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, serta peduli dengan aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin sering diabaikan, sangat besar harapan agar bantuan yang disalurkan tepat pada sasarannya, sebaiknya yang mendapat bantuan tersebut adalah orang-orang yang memang betul-betul butuh terhadap bantuan tersebut, oleh karenanya masyarakat merupakan elemen yang paling penting yang harus diperhatikan perekonomiannya. (wawancara 12 Mei 2018).

Dari wawancara diatas masyarakat berharap dengan adanya pergantian pemimpin yang baru, mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang ada, dan memang betul-betul

ingin mewujudkan visi dan misi yang disampaikan didepan khalayak banyak, karena sangat di khawatirkan jika tidak dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi warga Desa Takal Pasir. Kecamatan Singkil. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Kemiskinan merupakan elemen yang paling penting yang harus diperhatikan didalam sebuah Daerah, karena jika kemiskinan terus berlanjut maka pemerintahan sebuah daerah akan di anggap gagal, karena tidak mampu memberantasi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada didalam daerah tersebut. Dan jika kemiskinan makin bertambah maka lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat-masyarakatnya, karena masyarakat yang miskin akan lebih mudah dipengaruhi oleh golongan elit dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, karena masyarakat miskin juga dikategorikan masyarakat awam, yang tidak begitu tahu akan politik yang dimana mereka hanya mengambil uang tanpa memikirkan kepemimpinan kedepannya, dan ini merupakan bentuk kekeambal uang tersebut kecewaan masyarakat terhadap pemimpin yang dimana janji-janji yang pernah diucapkan tetapi tidak mampu diwujudkan, sehingga masyarakat tersebut berfikir kalau bukan sekarang mengambil uang suap itu kapan lagi, karena pada akhirnya semua sibuk dengan kekuasaan, kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok lainnya.(wawancara 13 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa alangkah baiknya pemerintah peduli akan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin sering terabaikan, bahwa pada dasarnya masyarakat juga berhak mendapatkan hak nya didalam sebuah daerah, seperti hak untuk medapatkan tempat tinggal yang layak, hak kebebasan hak berpendapat dan lain sebagainya.

4.3.2 Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan dan orientasi bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosilaisasi diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui montak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang atau individu berada. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh interaksi, pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku

politik. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi individu menerima rangsangan-rangsangan politik.

Sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik kenegaraan. Alasannya karena sosialisasi politik itu berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif. Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur politik yang ada. Selain itu juga sosialisasi politik juga menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik. Untuk menyampaikan pandangan, nilai, sikap, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana atau agen-agen sosialisasi politik, salah satu agen sosialisasi politik adalah keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Di sebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, lembaga pendidikan inilah yang pertama ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Peran keluarga dalam mensosialisasikan proses politik merupakan hal yang sangat penting. Orang tua sebagai panutan dan sumber informasi yang dibutuhkan seorang pemilih pemula karena pemahaman dan pengetahuan politik pemilih pemula dinilai kurang jika tidak ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang ditanamkan oleh orang tua.⁵

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat Desa Gosong Telaga Utara. Kecamatan Singkil Utara. Kabupaten Aceh Singkil. Hamdiani, ia mengatakan:

Bahwa politik itu kejam, kotor, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, contohnya didalam proses Pemilihan Kepala Daerah masih didapatkannya praktik politik uang, yang dimana sebelum pemilihan dimulai, para tim sukses dari masing-masing kandidat mendatangi setiap rumah masyarakat untuk memberikan uang, dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan kandidat yang telah diberikan uang tersebut, serta tidak hayon calon kandidat yang menebar-nebar janji dalam proses Pemilihan Kepala Daerah bahkan tim suksespun juga manaburkan janji-janji pemilu tersebut, yang dimana didalam janji pemilu itu jika terpilih nanti akan mewujudkan segala aspirasi masyarakat, khususnya perekonomian masyarakat akan lebih terjamin dan masyarakat akan lebih sejahtera. (wawancara 14 Mei 2018).

Dari uraian wawancara diatas dapat dilihat bahwa, kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa politik itu sangat kotor, curang, licik, dan bahkan sebagainya, yang dimana politik tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu kekuasaan, dan

⁵ Jurnal M. Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, *Sosialisasi Politik Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga*, 2017 (18-08-2018).

bila dilihat sampai sekarang ini yang dimana Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3, yang dimana hukum tersebut berlaku untuk semua orang tanpa ada perbedaan, tetapi yang dilihat sekarang bahwa, hukum tersebut hanya berlaku pada masyarakat kelas bawah, dikeranakan masyarakat kelas bawah yang kurang pemahamannya tentang politik dan disisi lain bahwa hukum tidak bisa dibeli oleh masyarakat kelas bawah, sehingga praktik politik uang tetap berlanjut di Negara yang Demokrasi ini, karena seperti yang diketahui bahwa politik uang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Negara Demokrasi, tetapi yang dilihat sekarang proses tersebut masih tetap terjadi.

Politik yang seharusnya memberikan dampak yang baik bagi rakyat tetapi yang dilihat sekarang adalah kebalikan dari apa yang ada, yang dimana disini sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mengontrol politik uang, tetapi yang terjadi sekarang malah tambah berlanjut, dan tidak hanya di Indonesia saja politik uang itu terjadi bahkan, di nagara-negara maju politik uang tersebut juga didapatkan.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang tidak acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap tidak acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang tidak acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon legislatif yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Dan untuk mengetahui politik sangat minim sekali karena untuk membahas hal yang seperti ini merupakan hal yang tidak terlalu penting, karena mereka sibuk mencari nafkah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya yang mendapatkan kekuasaan itu ialah orang-orang elit itu sendiri, sedangkan masyarakat diperhatikan ketika ajang Pemilihan Kepala Daerah itu hendak dilangsungkan, dan ketika sudah mendapatkan kekuasaan, janji maupun aspirasi masyarakat selama ini tidak diperdulikan lagi dan itu hanya iming-iming belaka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga Desa Takal Pasir. Kecamatan Singkil. Kabupaten Aceh Singkil. Ibu Aswidar, ia mengatakan:

Saya berharap kepada Bupati Aceh Singkil sekarang yaitu Pak Dumusrid agar kiranya mampu membawa masyarakat kepada generasi kegenerasi yang lebih baik lagi, mampu mengejar ketertinggalan, baik dari segi pembangunan, perekonomian, sosial, politik dan kesejahteraan yang selama ini mungkin sangat diharapkan oleh masyarakat, dan di samping itu juga pemerintah harus peduli terhadap segala-sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, karena yang dilihat sekarang pemimpin banyak mementingkan keperluan kelompok dan pribadi saja. (wawancara 15 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik atau independen. Dan salah satu tugas dari kepala daerah tersebut ialah bertanggungjaab dalam segala permasalahan yang terdapat didaerah tersebut.

Akan tetapi, yang kita lihat sekarang Ekspansi politisasi birokrasi yang biasa kita baca dari komentator politik ada yang mengatakan pimpinan politik itu dipilih intuk menduduki jabatan. Supaya kepemimpinannya berjalan.maka dibutuhkan kerjasama dangan staf yang kemudian dipergunakan untuk memperkuat hubungan atasan dan bawahan dalam birokrasi pemerintaha. Dari sikap seperti ini timbul jalinan akrab antara birokrasi dengan kekuasaan politik yang ada. Dari sini dimulai diperan birokrasi menjadi berpihak.

Penjelasan ini menjelaskan bahwa politisasi birokrasi dilakukan suapaya pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Dalam kontek Orde Baru, birokrasi diciptakan untuk memperkuat basis perekonomian penguasa agar bisa mengendalikan arga negara. Dengan kata lain, pemerintah merasa yakin bahwa birokrasi adalah mesin politik yang siap bekerja demi pengawetan kekuasaan secara terus-menerus.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat Desa Biskang. Kecamatan Danau Paris. Kabupaten Aceh Singkil. Ibu Santi, mengatakan bahwa:

Praktik politik uang akan terus berlanjut, karena di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil sendiri bisa dilihat bahwa politik uang itu masih terjadi, jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan tersebut belum berdasarkan kejujuran, yang dimana didalam pemberian uang tersebut bisa dinilai rendahnya harga masyarakat yang hanya disogok dengan uang cepat terpengaruhi, tanpa adanya pemikiran untuk memajukan daerah kedepannya, dan biasanya pemikiran seperti ini timbul diakibatkan yang dimana janji-janji yang pernah diucapkann tidak dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. (wawancara 16 Mei 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa begitu rendahnya harga masyarakat, yang disogok dengan uang bisa merobah segalanya, tanpa memikirkan perkembangan darah kedepannya, dan mungkin kekecewaan-kekecewaan yang dulu pernah diharapkan lalu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sehingga timbul kekecewaan yang mendalam.

Akan tetapi, politik tersebut menjadi pengaruh yang besar didalam suatu daerah sukses atau tidaknya birokrasi daerah tersebut, pada hakikatnya pandangan tentang politik ini sebenarnya baik, hanya saja orang-orang yang menjalankan perpolitikan tersebut yang salah, dimana menghalalkan segala cara baik maupun buruk untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

Sebenarnya politik uang itu tidak kejam, hanya saja para birokrasi-birokrasi yang menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang ada dan bahkan salah tujuan.

4.3.3. Membudaya (penyakit masyarakat yang sudah terbiasa)

Negara Indonesia kaya akan keanekaragaman budayanya, sehingga negara indonesia memiliki banyak perbedaan budaya ditiap daerahnya. Pada era demokrasi sekarang ini, kebudayaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi masyarakat dalam bertindak atau mengambil keputusan untuk menghadapi demokratisasi dalam suatu perpolitikan. Contoh Sebagian besar masyarakat minangkabau masih menjunjung tinggi ikatan primordial dalam dirinya untuk menghadapi zaman demokratisasi pada saat sekarang ini. Contohnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik pemilu presiden, pemilu egislatif, ataupun pemilu kepala daerah, salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Minangkabau adalah bentuk sistem kekerabatan yang dari dulu hingga sekarangt masih melekat.

Ikatan primordialisme merupakan salah satu bagian dari identitas disuatu daerah, yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan suara pada saat pemilu, sehingga elit-elit politik dengan mudah mendekati masyarakat yang masih memegang teguh ikatan primordialisme. Perilaku memilih merupakan cara seseorang berinteraksi pada saat pemilu, yakni bagaimana pilihan politik seseorang pada saat memilih calon kandidat atau partai apa yang akan mereka pilih pada saat pemilu. Perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor primordialisme dan faktor profesionalisme. Perilaku memilih berdasarkan faktor primordialisme adalah yang mempengaruhi perilaku memilih yaitu berdasarkan dari bentuk kekerabatan, kesukuan, atau dari kebiasaan yang dijadikan kepercayaan sejak dulunya.

Sedangkan faktor profesionalisme adalah yang mempengaruhi perilaku memilih yaitu berdasarkan pertimbangan kecerdasan intelektual dalam berpartisipasi politik.⁶

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Sese seorang warga Desa Takal Pasir. Kecamatan Singkil. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Jika kita berbicara mengenai kebudayaan maka kita juga berbicara masyarakat, karena kebudayaan menunjukkan pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat. Walaupun didalam setiap kehidupan bermasyarakat pasti didapatkan berbagai kebudayaan dan berbagai kepercayaan, baik dari segi bahasa, suku, bangsa, ras, maupun agama, tetapi kita tetaplah satu kesatuan meskipun terkadang sering melahirkan berbagai pendapat-pendapat dan bahkan juga konflik dalam masyarakat itu sendiri jika kita tidak bisa menghargai dan merespon baik terhadap pendapat dari orang lain. Ini sangat tergantung kepada sejauh mana masyarakat tersebut bisa saling toleransi dengan orang lain demi menghargai suatu kebudayaan dan kepercayaan didalam masyarakat itu sendiri. Dan disini politik uang juga merupakan bentuk dari kebudayaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja sekalipun, hukum itu berlaku untuk semua orang. (wawancara 17 Mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan yang bahwa, kebudayaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan akan keberadaannya, walaupun kesenjangan-kesenjangan didalam masyarakat itu pasti akan terjadi, dan itu semua tergantung kembali kepada kita pribadi bagaimana merespon dan menghargai perbedaan yang terdapat didalam masyarakat.

Sebenarnya kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Seseorang sosiologis terutama akan menaruh perhatiannya pada perwujudan perilaku individu yang nyata pada waktu individu tersebut berhubungan dengan individu-individu lainnya. Wujud perilaku tersebut dinamakan peranan, yaitu perilaku yang berkisar pada pola-pola interaksi manusia. Dasar-dasar pokok perilaku seseorang merupakan faktor-faktor biologis dan psikologis. Walaupun seseorang sosiologis hanya menaruh perhatian khusus pada kepribadian yang terwujud dalam interaksi masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Hamzah, warga Desa Siompin. Kecamatan Suro Makmur. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Menurut saya membudaya (kebiasaan) adalah suatu sifat manusia yang sangat sulit dihilangkan, karena itu merupakan sifat yang sudah melekat dalam diri manusia, dan bila dilihat didalam kehidupan sekarang yang tidak

⁶ Retfi Hestixia. Dkk, 2015, *Pengaruh Ikatan Primordialisme Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kecamatan Gunng Talang*, (22-08-2018).

bisa dihilangkan ialah adanya rasa ikut-ikutan antara individu yang satu dengan yang lainnya misalnya saja didalam Pemilihan Kepala Daerah yang melakukan politik uang, itu merupakan bentuk suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, dan disamping itu juga masyarakat beranggapan bahwa pemberian uang dalam proses pemilu tersebut merupakan suatu bentuk pemberian rezeki yang tidak bisa ditolak akan keberadaannya, mungkin disamping itu juga masyarakat jarang diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya terhadap perekonomiannya sehingga timbul adanya rasa ikut-ikutan dalam pengambilan uang tersebut tanpa memikirkan perkembangan kedepannya. (wawancara 18 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, politik uang juga merupakan suatu bentuk kebudayaan yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan, sekalipun pemberi dan penerima uang tersebut hukumnya haram, tetapi praktik ini terus berlanjut.

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, dan pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah suatu bentuk pelanggaran kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suatunya untuk partai yang bersangkutan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bakti, salah seorang warga Desa Gosong Telaga. Kecamatan Singkil Utara. Kabupaten Aceh Singkil. Ia mengatakan:

Banyaknya kebudayaan yang ada, cepat dan lambat kesalahpahaman didalam masyarakat itu pasti akan terjadi, karena tidak semua orang mampu memahami kebudayaan dan perbedaan itu sendiri. Maka dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat akan sangat sulit menyatukan mereka dalam sebuah perkumpulan yang besar, contohnya saja Aceh yang sangat kecil ruang lingkupnya bila dibandingkan dengan Indonesia, tetapi sangat sulit untuk disatukan, dan untuk saat ini Indonesia masih dalam bentuk kategori negara berkembang, yang belum bisa seperti negara-negara maju, dan hanya ada satu solusi dari permasalahan tersebut ialah adanya rasa saling menghargai, karena pada dasarnya kita adalah NKRI. (wawancara 19 Mei 2018).

Dari argumen diatas menunjukkan yang bahwa perbedaan-perbedaan dalam masyarakat itu pasti ada, baik dengan sesama budaya maupun antar budaya, dan terkadang mengakibatkan dampak yang buruk pula dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, maka alangkah baiknya kita harus saling menghargai antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, karena pada dasarnya kita adalah satu kesatuan dan satu tujuan.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat enar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan

untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.⁷

4.3.4 Persamaan Suku

Indra Kesuma Nasution (2014) menegaskan bahwa di Medan, Sumatera Utara, identitas kesukuan berpengaruh terhadap partisipasi politik, terutama perilaku politik dalam Pilkada langsung 2010. Terkait pengaruh faktor kesukuan dalam Pilkada, Edward Aspinall (2011) menjelaskan bahwa identitas kesukuan dalam pertarungan politik Pilkada digunakan dalam tiga hal, yaitu dalam memobilisasi simbol kesukuan, menjadi pertimbangan pemilih, dan seleksi dan strategi kandidat pemimpin (seperti putra daerah).

Di dalam masyarakat multietnis dengan ikatan erat pada masing-masing etnis, persaingan dalam politik Pilkada tersebut tidak dapat mencegah munculnya politik identitas kesukuan. Dengan adanya ikatan yang erat pada identitas etnis, hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan pertimbangan politik mereka. Artinya, sulit dibayangkan bahwa masyarakat pemilih tidak menghiraukan latar belakang suku pasangan calon pemimpin daerah. Perilaku pemilih yang bergantung pada identitas politik kesukuan ini dianggap tidak rasional. Di Bengkulu, selama Pilkada langsung pertama dan kedua, politik identitas kesukuan diduga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kewenangan sa;ah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur.⁸

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Ida warga Desa Pandan Sari. Kecamatan Simpang Kanan. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Dengan adanya persamaan suku antara calon kandidat dengan masyarakat yang memilih, maka cenderung masyarakat tersebut memilih yang sesuku dengan dia, dan disamping itu juga, pasti sudah banyak janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat apabila dia memenangkan Pemilihan Kepala Daerah nantinya. Karena kemungkinan besar apabila seorang kandidat tersebut menang dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang paling utama sekali diangkatnya jadi kabinet-kabinetnya pada masa kepemimpinannya itu bukan lagi orang asing melainkan saudara-saudaranya, dan hal yang seperti ini bukanlah hal asing lagi bila kita lihat di daerah kita sendiri. Dan jika yang sesuku dengan kita memenangkan dalam Pemilihan Daerah maka, akan lebih mudah kita untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki perekonomian. (wawancara 20 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menerangkan bahwa, jika seorang calon kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah sesuku dengan kita dan kemudian calon kandidat tersebut memenangkan dalam pemilihan tersebut maka, kita akan lebih mudah untuk

¹⁵Kartini Kartono, 1990, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 61.

⁸ Jurnal Idris Hemay dan Aris Munandar, 2015, *Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih*, (23-08-2018).

mendapatkan suatu pekerjaan, karena itu timbul istilah bahwa, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka dari itu dapat kita lihat bahwa suku memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, bisa memperbaiki perekonomian dan pendapatan kita sehari-hari, dan hal seperti ini bukan hanya di perkotaan saja yang kita lihat bahkan diperdesaan juga hal-hal yang seperti ini.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Zamzami warga Desa Biskang. Kecamatan Danau Paris. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Menurut saya, suku bukan merupakan faktor determinan dalam kemenangan Kandidat Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil, dikarenakan yang dilihat bahwa jika mereka memenangkan pemilihan tersebut mereka lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi, walaupun hanya sebagai kecil yang peduli akan kebutuhan masyarakat baik dari persamaan suku maupun dengan masyarakat lainnya. (wawancara 21 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, suku bukan merupakan faktor determinan kemenangan kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah. Karena suku hanya sebagai lambang dari identitas masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya semua hanya mementingkan kepentingan masing-masing.

Pada masa 3000–500 Sebelum Masehi, Indonesia telah dihuni oleh penduduk migran submongoloid dari Asia yang di kemudian hari menikah dengan penduduk Indigenous. Pada 1000 Sebelum Masehi pernikahan silang masih terjadi dengan penduduk migran Indo-Arian dari Asia Selatan, subsuku ini dari India. Alhasil, masuknya para pendatang dari India dan menyebarkan agama Hindu ke seluruh kepulauan.

Pada abad XIII, pedagang muslim dari Gujarat dan Persia mulai mengunjungi Indonesia melakukan perdagangan. Bersamaan dengan berdagang, penduduk Gujarat dan Arab melakukan penyebaran agama Islam ke wilayah sekitar. Selanjutnya di tahun 1511, Portugis tiba di Indonesia. Awalnya kedatangan Portugis bertujuan untuk mencari rempah, namun lambat laun mereka juga menyebarkan agama Kristen. Serentetan perjalanan sejarah ini menghasilkan lebih dari lima puluh kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria warga Desa Siompin. Kecamatan Suro Makmur. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Suku adalah golongan sosial yang ada dikalangan masyarakat yang digunakan untuk membedakan golongan yang satu dengan golongan lainnya. Biasanya setiap suku memiliki ciri khas tersendiri. Suku juga bisa diartikan sebagai golongan manusia yang terkait dengan kebudayaan masyarakat tertentu, dan Indonesia tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya

(SDA) bahkan Indonesia juga kaya akan suku bangsa. (wawancara 22 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menubjukkan bahwa, perbedaan ciri fisik merupakan ciri pertama yang membedakan suatu suku dengan suku lainnya. Dan disamping itu juga kita bisa mengetahui seseorang dari suku mana berasal dengan dia berbahasa.

Suku bangsa memiliki struktur sosial yang jelas dan tertata baik sejak dulu kala, yang dimana sama-sama memiliki ras, agama, asal-usul bangsa, dan sama-sama terikat pada nilai kebudayaan tertentu., dan jika berkomunikasi hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, yang mencerminkan bahwa berbeda-beda tapi tetap satu tujuan.

4.3.5 Pemikiran yang lebih maju

Pilkada serentak yang segera digelar akan kembali menguji kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan rasional dibanding latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya, pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok dari pada kepentingan agama atau etnis tertentu.

Hal yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah publik berharap pelaksanaannya pilkada tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik. Karena kepala daerah terpilih nantinya terutama diharapkan juga dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, usaha kecil menengah, memperbaiki infrastruktur visi misi pasangan calon ditaati dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi.

Keinginan dari publik mendapatkan kepala daerah yang melayani masyarakat tentu akan bergantung pada para pemilihnya. Apakah mereka dengan mudah tergoda oleh politik uang, emosional primordial atau mempengaruhi pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.⁹

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasep warga Desa Biskang. Kecamatan Danau Paris. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Menurut saya, pemikiran maju ini timbul karena adanya rasa kesadaran didalam diri manusia untuk merubah pola kehidupan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang sama-sama menyadari bahwa pemikiran yang lebih maju itu sangat penting. Dan bila dilihat sampai

⁹ Jurnal Pratiwi Tedjo, 2018, *Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan*, (24-08-2018).

sekarang negara Indonesia saja belum bisa dikatakan dengan negara maju karena, belum mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan seperti negara-negara lain yang telah maju, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, kesejahteraan, perluasan lapangan pekerjaan, pembangunan dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini negara lain merupakan motivasi bagi negara Indonesia untuk mengejar ketertinggalan itu. (wawancara 23 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, tidak semua orang mempunyai keinginan dan cita-cita bersama untuk sebuah tujuan-tujuan bersama yang ingin diwujudkan, dan pemikiran yang lebih maju biasanya ada karena lahirnya rasa kesadaran didalam diri manusi, tetapi ada sebagian masyarakat kurang memikirkan hal ini, bisa saja kurangnya pemahaman masalah politik dan mungkin disamping itu juga aspirasi dan pendapat selama ini pernah disampaikan mungkin tidak dihargai.

Dan masyarakat terkadang sibuk dengan mata pencaharian sehari-hari sehingga kurang memikirkan perkembangan kedepan akan seperti apa, karena masyarakat beranggapan kekuasaan dan kedudukan bahkan kesejahteraan itu hanya dapat dirasakan oleh kalangan elit politik saja, dan masyarakat hanya menjadi bau di tanah sendiri yang tidak tau apa-apa terhadap perkembangan suatu daerah.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Putra warga Desa Pandan Sari. Kecamatan Simpang Kanan. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Pemikiran maju adalah sebuah bentuk perubahan dan peralihan keadaan dari masa yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat. Dan tidak seorangpun bisa merubah pola pikir seseorang melainkan kesadaran dari orang-orang itu sendiri yang lahir dan timbul dalam diri untuk merubah kehidupan yang lebih baik. (wawancara 24 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, pemikiran yang mempunyai keinginan yang ada dalam diri manusia, baik dari segi pola pikir maupun perilaku manusia itu sendiri untuk mencapai tujuan atau perubahan yang sebenarnya.

Maju dalam artian bukan hanya perubahan pola pikir, dan perbuatan, tetapi maju juga merupakan adanya bentuk kesadaran masing-masing individu untuk merubah baik dirinya sendiri maupun perkembangan daerahnya, karena tidak ingin lagi merasakan kehidupan yang sama dari masa-kemasa, karena itu timbul kesadaran untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Aida warga Desa Biskang. Danau Paris. Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Pemikiran maju adalah bentuk perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (wawancara 25 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, pemikiran maju bukanlah dari segi pola pikir saja, tetapi pemikiran yang maju juga memberikan dampak yang berpengaruh bagi orang lain, baik bagi diri sendiri maupun untuk kemajuan suatu daerah.

Akan tetapi, pemikiran maju juga berpengaruh karena adanya niat dan kemauan bersama untuk mencapai suatu tujuan-tujuan bersama yang selama ini mungkin tidak dapat dirasakan oleh masyarakat makna dari kemajuan itu yang sebenarnya.

4.3.6 Masyarakat Apatis

Banyak kalangan yang pesimis terhadap pemilu sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Persis seperti yang alami oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ketika pemilihan umum semakin dekat. Hal ini memang menjadi fenomena musiman menjelang pelaksanaan pemilu. Fenomena apatisme publik ini tek lepas dari pola perilaku elektoral rakyat Indonesia sendiri yang kerap kali terjebak dalam politik pragmatis. Dalam pelaksanaan demokrasi, apatisme publik yang ditunjukkan oleh masyarakat kita menggambarkan suramnya masa depan. Melukiskan ketidakberdayaan mereka dalam menentukan sendiri masa depan. Seolah-olah pasrah menggantungkan segala asa pada orang lain yang belum tentu ia kenal dalam menentukan pemimpinnya. Padahal, demokrasi seharusnya dipandang sebagai ujud pelaksanaan amanah. Vaik amanah rakyat dalam memilih pemimpin demi kebaikan mereka semua, ataupun amanah pemimpin terpilih untuk mengayomi rakyat yang telah memilihnya.

Seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap arga negara terhadap negaranya, pemerintahannya, pemimpin politik dan lain-lain. Selanjutnya demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam ikhtiar penelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

Sebagaimana hasil awancara penulis dengan Saydah warga Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Apatis merupakan sifat manusia yang tidak dapat dihilangkan, mungkin disamping itu juga mengapa sifat tersebut bisa ada, mungkin dikarenakan terlalu banyaknya janji-janji manis dalam Pemilihan Kepala Daerah yang tidak

¹⁰ Jurnal Reza Fahmi, 2014, *Pengaruh Pendidikan Politik dan Kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatis Pemilih Dalam Pemilu 2014*, (24-08-2018).

dapat direalisasikan. Contohnya saja didalam Pemilihan Kepala Daerah masih banyaknya didapati masyarakat yang apatis dalam pemilihan tersebut seperti visi dan misi hanya janji saja, sedangkan untuk meujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan tujuan bersama belum dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin (wawancara 26 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, apatis merupakan sifat manusia yang tidak bisa dihilangkan, dan dibalik itu juga mungkin apatis itu timbul dikarenakan adanya bentuk kekecewaan masyarakat yang mendalam, bisa saja karena janji-janji pemerintah kepada masyarakat yang belum bisa diwujudkan dengan baik.

Penyebab mengapa masyarakat demikian apatisnya tentu tidak terlepas dari pengalaman dimasa lalu. Refleksi kinerja pemerintah selama ini beserta tindak tanduk para pejabat yang dianggap tidak menyentuh dihati rakyat sehingga menjadi pelajaran bagi rakyat. Keadaan saling menguntungkan yang terjalin antara rakyat dan wakil rakyat belum pernah secara nyata ditemui masyarakat. Namun, sngat disayangkan ketika buah dari pelajaran masa lalu itu adalah rasa jera, hilangnya semangat berdemokrasi, kebosanan bahkan keengganan untuk menyalurkan aspirasinya.

Masyarakat akhirnya meragukan terciptanya perubahan lewat proses pemilu karena suasana yang ditampilkan selalu tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Saat-saat seperti ini semua pihak merasa dan mengklaim diri sebagai pihak yang dekat dengan rakyat. Membuat masyarakat sekan larut dalam euforia untuk mensejahterakan diri sendiri (mengejar kemakmuran) tanpa melihat bagaimana fenomena yang terjadi negaranya saat ini, pengaruh kemiskinan yang sekaligus yang berimbas kepada kebodohan bangsa belum menjadi perhatian serius dari generasi tua maupun para elit-elit politik bangsa ini.

Pengaruh perkembangan informasi dan era globalisasi yang mulai merebak di negara kita juga menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi generasi muda. Mereka sudah mulai meninggalkan kebudayaannya yang menjadi jati dirinya dan itu diperkuat lagi dengan semangat globalisasi yang begitu kental dan digelorakan oleh pihak asing. Generasi muda seakan telah meningglkan jati diri banganya dan mulai terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang mulai menunjukkan tajinya dan sekaligus telah meguasai seluruh aspek kehidupan dinegara kita.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali seorang warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Menurut saya apatis merupakan sifat manusia yang tidak tetap dan kadang berubah-ubah, hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang seseorang sibuk dengan mata pencahariaannya, dan terkadang dia juga

menyisihkan waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain. Contohnya melakukan gotong royong bersama dengan tujuan menjaga kebersihan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sifat manusia itu tidak tetap (wawancara 27 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa apatis adalah sifat manusia yang tidak pernah acuh segala persoalan yang terdapat didalam masyarakat maupun didalam daerah sendiri, dan apatis itu juga timbul dikarenakan adanya janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat tetapi tidak dapat diwujudkan. Yang terkadang dari kalangan-kalangan elit itu banyak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Evi warga Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Apatisme adalah suatu bentuk kepercayaan diri seseorang yang dia menganggap bahwa dirinya bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan hubungan dengan orang lain, maka dari itu dia merasa acuh tak acuh terhadap suatu situasi yang ada didalam lingkungannya. Mungkin apatisme itu muga lahir dikarenakan hidup berkelompok itu sangat susah dan terkadang cenderung melahirkan sebuah masalah dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat antar individu dengan individu lainnya (wawancara 28 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, masyarakat yang demikian apatisnya tentu tidak terlepas dari pengalaman dimasa lalu. Kinerja pemerintah selama ini yang dianggap belum menyentuh hati rakyat, sehingga menjadi pelajaran bagi rakyat itu sendiri.

Keadaan saling menguntungkan yang terjalin antara rakyat dan wakil rakyat belum pernah secara nyata ditemui masyarakat. Namun sangat disayangkan hilangnya semangat demokrasi, kebosanan bahkan keengganan dalam menyampaikan berbagai aspirasinya, yang dimana Negara telah kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat yang belum menyentuh kinerjanya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Berkembangnya peradaban kearah modernisasi dan rasionalisasi, membuat masyarakat sekan larut untuk meningkatkan perkembangan kesejahteraan diri sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah dikarenakan kekecewaan yang belum bisa dituntaskan, dan pengaruh kemiskinan dan kebodohan bangsa selama ini belum menjadi perhatian serius dari generasi sebelumnya maupun para eleit-elit politik saat ini. (wawancara 29 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, apatisme itu hadir karena kemiskinan dan kebodohan yang selama ini dialami masyarakat belum memberikan pengaruh yang baik, dikarenakan kurangnya perhatian dari generasi sebelumnya dan bahkan kalangan elit politik bangsa itu sendiri, sehingga timbul kesadaran tersendiri dalam diri masyarakat untuk menyejahterakannya, karena beranggapan baha generasi tua dan elit politik tidak mampu mewujudkan cita-cita masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Agus warga Desa Siompi, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, ia mengatakan:

Apatisme dimasyarakat membuat masyarakat menutup mata atas apa yang terjadi disekitarnya. Kemudian berimbas menjadi tidak mengenalnya individu terhadap lingkungannya sehingga masyarakat tidak lagi mengenal nilai yang telah beredar dimasyarakat sebelumnya. Matinya nilai-nilai yang ada dimasyarakat, sama dengan mengarahkan manusia kepada peradaban yang biadab dan tidak bermoral. Matinya rasa kepedulian, nilai-nilai dan hati nurani, dan pandangan tentang keadilan membutuhkan masyarakat akan hukum dan keadilan (wawancara 30 Mei 2018).

Berikut adalah tempat penelitian

1. Kecamatan Singkil Utara (Desa Gosong Telaga Utara)
2. Kecamatan Singkil (Desa Takal Pasir)
3. Kecamatan Gunung Meriah (Desa Sidorejo)
4. Kecamatan Simpang Kanan (Desa Pandan Sari)
5. Kecamatan Danau Paris (Desa Biskang)
6. Kecamatan Suro Makmur (Desa Siompin)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Di dalam Pemilihan Kepala Daerah ada beberapa terdapat model masyarakat diantaranya, adanya masyarakat miskin, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, dan kebudayaan, yang dimana maksud dari kebudayaan contohnya ialah adanya praktik politik uang yang didapatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, dari hasil wawancara yang saya lakukan dari sebanyak 30 masyarakat menunjukkan bahwa, banyaknya bentuk kekecewaan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang dimana banyaknya visi dan misi yang disampaikan oleh para calon-calon kandidat belum mampu direalisasikan dengan baik, serta aspirasi masyarakat yang dianggap hanya sebagai omong kosong saja, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah juga sebagai tangan untuk penyampai aspirasi-aspirasi para masyarakat, karena rakyat dan wakil rakyat itu saling bergantung karena, wakil rakyat itu dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai penyambung segala masalah-masalah yang terdapat didalam masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang pada hakikatnya tidak bisa hidup dan berinteraksi sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain, serta didalam masyarakat juga terdapat berbagai bentuk ketegangan-ketegangan ditimbulkan dalam hidup berkelompok, sebagaimana halnya para orang-orang awam (miskin) yang sangat minim untuk mengetahui permasalahan-permasalahan politik itu pasti akan sangat terganggu ketegangan sosialnya, karena para orang-orang awam berpikir politik itu hanya dimengerti oleh kalangan elit saja, sedangkan masyarakat biasa hanya sebagai gambaran dalam memperlengkap suatu kebijakan.

Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri akan keberadaannya, karena didalam negara demokrasi politik uang bukanlah suatu hal yang asing lagi diperbincangkan, bahkan praktik politik uang sudah merupakan suatu bentuk kebudayaan yang sudah sulit untuk dihilangkan. Permasalahan yang dapat saya kutip dari hasil wawancara dengan masyarakat yang bahwa mengapa politik uang itu sulit untuk dihilangkan karena, adanya bentuk kekecewaan dari masyarakat kepada para pemenang yang mendapatkan kursi dalam Pemilihan Kepala Daerah yang hanya menaburkan janji-janji dalam Pemilihan Kepala Daerah saja tetapi tidak ada setikitpun rasa untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi itu, serta sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat agar dengan pergantian wakil rakyat bisa mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang pernah ada dimasa lalu agar tidak terulang kembali. Tetapi dengan pergantian wakil rakyat dari masa-

kemasa belum apapun yang dapat tersentuh dalam masyarakat diantaranya baik dari segi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan mutu pendidikan, pengurangan angka kemiskinan dan lain sebagainya, sama sekali belum bisa dirasakan oleh masyarakat akan hal itu.

Maka dari itu dapat dilihat yang bahwa praktik politik uang didalam Pemilihan Kepala Daerah adalah sesuatu hal yang mustahil bila dihilangkan, karena dianggap sudah menjadi suatu kebudayaan didalam negara demokrasi, sehingga dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah tersebut, timbul berbagai model-model masyarakat didalam Pemilihan Daerah itu sendiri, maka dari itu dibutuhkannya peran dari pemerintah untuk bisa merealisasikan berbagai aspirasi-aspirasi yang disampaikan dari kalangan masyarakat, sehingga bisa melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan kedepan yang selama ini mungkin tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Sukses atau tidaknya perkembangan suatu daerah itu ditentukan oleh sudah sejauhmana pemimpin daerah tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang pernah ada serta mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dari masa sebelumnya. Dan disamping itu juga masyarakat sangat membutuhkan adanya bantuan pemerintah yang tepat sasaran, dalam artian yang memang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, jangan adanya tumpang tindih antara wakil rakyat dan masyarakat-masyarakat lainnya.

5.2 Saran

Menurut saya masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya didalam Pemilihan Kepala Daerah yang dimana, masih banyaknya aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk para calon-calon wakil rakyat jika sudah mendapatkan kursi kedudukan tersebut lupa akan janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan golongan putih dan tidak memilih sama sekali dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dan didalam Pemilihan Kepala Daerah masih banyaknya model-model yang timbul dikalangan masyarakat itu sendiri akibat aspirasi yang tidak pernah direalisasikan dengan baik, karena pada akhirnya semua sibuk dengan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok sehingga membuat masyarakat sekan terpecah belah, maka dari itu dapat dilihat sudah sejauh mana perkembangan suatu daerah bisa dijalankan, dan program apa saja yang bisa digapai dari masa sebelumnya.

Di dalam Pemilihan Kepala Daerah sebaiknya diperhatikan lebih jauh lagi visi dan misinya dan disamping itu juga sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk terjun kelapangan dan melihat langsung proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut agar, hal-hal seperti praktik politik uang tidak hadir lagi dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah, serta hukum jangan hanya sekedar hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan bukti yang dilihat dilapangan secara langsung, praktik politik uang belum mampu dihilangkan didalam negara yang demokrasi, jika kesenjangan dan permasalahan seperti ini tetap berlanjut, maka tidak heran lagi Indonesia disebut dengan negara berkembang, buktinya saja Indonesia belum mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalannya yang ada dimasa lalu.

Dan disamping itu juga kita perlu untuk tetap menanamkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya Indonesia yang lebih maju lagi, namun tetap mempertahankan ciri ke Indonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rofiq, Aunur, 2006, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bottomore, Tom, 1992, *Sosiologi Politik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini, 1990, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Syaifulloh, Chavchay, 2008, *Generasi Muda Menolak Kemiskinan*, IKAPI, PT Cempaka Putih.
- Suharizal, 2011, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahdan, Gregorius dan Haboddin, Muhtar, 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, Yogyakarta, IKAPI, PT Cempaka Putih.

JURNAL

- Astim, Riyanto, 2006, *Budaya Politik Indonesia*, (20 Agustus 2018)
- Aditya, Dodiet, 2012, *Konsep Dasar Masyarakat*, (12 September 2018)
- Dulmusrid, 2017, *Calon Kandidat Aceh Singkil*, (Aceh Singkil 2017)
- Erwin, Prima, Rinando, 2016, *Penguatan Kelembagaan Pengasa Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (26 Agustus 2018)
- Hestixia, Refti. Dkk, 2015, *Pengaruh Ikatan Primordialisme Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kecamatan Gunung Talang*, (22 Agustus 2018)
- Hasil Riset, 2016, *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*, (30 Juli 2018)
- Idris, Hemay dan Aris, Munandar, 2015, *Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih*, (23 Agustus 2018)
- Lili, Romli, 2008, *Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada*, (30 Juli 2018)
- M, Teguh, Wibowo dan Effendi, Hasan, 2017, *Sosialisasi Politik Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga*, (18 Agustus 2018)
- Nopyandri, 2006, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945*, (30 Juli 2018)
- Okta, Kurniawan, TB dan Sirojuzilam, 2006, *Analisis Pusat Pertumbuhan Kabupaten Aceh Singkil*, (05 Agustus 2018)
- Pratiwi, Tedjo, 2018, *Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan*, (24 Agustus 2018)
- Reza, Fahmi, 2014, *Pengaruh Pendidikan Politik dan Kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatis Pemilih Dalam Pemilu 2014*, (24 Agustus 2018)
- R, Bayubroto, 2009, *Penegakan Hukum*, (24 Agustus 2018)
- Senja, Mayangsari, Ayu, 2017, *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*, (14 September 2018)
- Uinsby Digilib, 2011, *Pengertian Kelompok Sosial*, (13 September 2018)
- _____. 2011, *Nilai-Nilai Sosial*, (15 September 18)
- _____. 2011, *Pengertian Kelompok Sosial*, (15 September 2018)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SIMPANG KANAN
KAMPUNG PANDAN SARI**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / 123 / PS / V / 2018

Berdasarkan Surat Permohonan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan dengan Nomor : B-868/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Kampung Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan.

Kepala Kampung Pandan Sari dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **ASIH WAHYUNI**
NIM : 140801046
JURUSAN : Ilmu Politik
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UNIVERSITAS : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Benar yang tersebut diatas sepengetahuan kami iannya telah selesai melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud di Kampung Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan tentang : Pemilihan Kepala Daerah Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Terhadap Model Masyarakat, terhitung sejak tanggal 29 s/d 30 Mei 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.





PENBERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-867/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2018 Banda Aceh, 23 Mei 2018
Lampiran : -
Judul : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Warga Kec. Simpang Kanan

Aceh Singkil

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Asih Wahyuni
NIM : 140801046
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Terhadap Model Masyarakat

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



NOMOR: 179/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRI BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Abdullah Sani, MA Sebagai pembimbing pertama
2. Eka Januar, M.Soc.Sc Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi
Nama : Asih Mahyuni
NIM : 140801046
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Model Masyarakat.
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Februari 2018



- Tembusan
1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

Identitas Responden/ Informan-

Nama Responden :

Jenis Kelamin :
Usia Responden :
Jabatan Responden :
Jumlah Memilih :
Tanggal Wawancara :

Petunjuk Wawancara

1. Ucapan terimakasih kepada responden/informan atas kesediaannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan kepada responden/informan tentang tujuan wawancara.
3. Jelaskan bahwa responden/informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau saran yang berkaitan dengan topik wawancara.
4. Catat dan rekam seluruh pembicaraan saat proses wawancara berlangsung.

Daftar Pertanyaan

- **Masyarakat**

1. Apakah Bapak/Ibu ada berpartisipasi dan ikut serta dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah?
2. Apa tujuan dan keinginan Bapak/Ibu dalam Pemilihan Kepala Dearah?
3. Ada berapa pasangan kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah?
4. Sudah berapa kali Pemilihan Kepala Daerah yang sudah dilaksanakan?
5. Pasangan siapakah yang Bapak/Ibu pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah?
6. Apakah ada paksaan Bapak/Ibu dalam Pemilihan Kepala Daerah?
7. Atas landasan apa Bapak/Ibu memilih pasangan kandidat?
8. Apakah pasangan kandidat ada menggunakan politik uang?
9. Apakah Bapak/Ibu ada menerima politik uang?
10. Bagaimana sebenarnya pandangan Bapak/Ibu mengenai politik uang tersebut, sedangkan politik uang tidak diperbolehkan dalam Negara Demokrasi?

LAMPIRAN



Nama : Sartun
Alamat : Desa Sidorejo
No Hp :-
Pekerjaan : Wira Swasta



Nama : Fitri
Alamat : Desa Sidorejo
No Hp :-
Pekerjaan : Mahasiswa



Nama : Faini
Alamat : Desa Sidorejo
No Hp :-
Pekerjaan :IRT



Nama : Foniem
Alamat : Desa Sidorejo
No Hp :-
Pekerjaan :IRT



Nama : Lasmini

Alamat : Desa Sidorejo

No Hp :-

Pekerjaan : IRT



Nama : Dewi

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp :-

Pekerjaan : IRT

Nama : Aswidar

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp :-

Pekerjaan : IRT

Nama : Upik Bugis

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp :-

Pekerjaan : IRT

Nama : Sese

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp :-

Pekerjaan : IRT

Nama : Indriani

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp :-

Pekerjaan : IRT



Nama : Hamdiani
Alamat : Desa Gosong Telaga Utara
No Hp :-
Pekerjaan : Honorer
Nama : Saydah
Alamat : Desa Gosong Telaga Utara
No Hp :-
Pekerjaan : Guru Honorer

Nama : Bhakti
Alamat : Desa Gosong Telaga Utara
No Hp :-
Pekerjaan : Wira Swasta



Nama : Zulfiansyah
Alamat : Desa Gosong Telaga Utara
No Hp :-
Pekerjaan : Sekretaris Desa (SEKDES)



Nama : Andi Junaidi

Alamat : Desa Sidorejo

No Hp : 082272738979

Pekerjaan : Keuchik Desa Sidorejo





Nama : Sarman, S. Sos.I

Alamat : Desa Takal Pasir

No Hp : 082211557748

Pekerjaan : Keuchik Takal Pasir



Nama : Genti Berutu
Alamat : Desa Siompin
No Hp : 085306580316
Pekerjaa : Keuchik Suro Makmur



Nama : Bos Ariantoni Berasa
Alamat : Desa Biskang
No Hp : 085296685259
Pekerjaan : Sekretaris Danau Paris



Nama : Arbasar

Alamat : Desa Pandan Sari

No Hp : 085261176110

Pekerjaan : Keuchik Simpaang Kanan

BIODATA PENULIS

Identifikasi Diri

Nama : Asih Mahyuni
Tempat/Tgl. Lahir : Gosong Telaga, 15 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 140801046
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Prodi Ilmu Politik
IPK Terakhir : -
Judul Skripsi : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Suatu Tinjauan Model Masyarakat
Alamat Sekarang : JL. Datuk Ijo, Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
No, Hp : 085270724222

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mahibuddin
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Nurapida
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 1 Gosong Telaga : 2003-2008
b. SMP Negeri 1 Singkil Utara : 2008-2011
c. SMA Negeri 1 Singkil Utara : 2011-2014
d. Akademi S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan : 2014-2018